



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH**



TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penambahan penduduk dan aktifitas masyarakat perlu didukung dengan penyediaan lahan yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2035.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035, yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 tahun.
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan:

- a. sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang PKP;
- b. untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan PKP; dan
- c. sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RP3KP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi PKP terhadap kawasan fungsi lain;
- c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
- e. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PKP di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan prinsip:

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan dan RTRW Provinsi;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota, antar sektor, dunia usaha dan masyarakat;
- c. menyesuaikan dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya daerah;
- d. menyesuaikan dengan masalah, potensi pembangunan dan pengembangan PKP di daerah masing-masing;
- e. menerapkan kebijakan pembangunan PKP dengan hunian berimbang; dan
- f. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI

Pasal 5

(1) Penjabaran RP3KP Provinsi disusun dalam bentuk:

- a. buku rencana; dan
- b. album peta.

(2) Buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;

- b. arahan operasional pemanfaatan ruang yang selaras dengan RTRW Daerah;
- c. arahan lokasi dan sasaran pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis Daerah;
- d. arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang daerah provinsi bagi pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang memiliki potensi menjadi basis pengembangan ekonomi kawasan;
- e. arahan investasi jaringan prasarana, sarana dan utilitas umum berskala regional untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. penetapan prioritas penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis di Daerah;
- h. fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Daerah;
- i. pengaturan integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait termasuk rencana investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas daerah kabupaten/kota;
- j. arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas kabupaten/kota;
- k. sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Daerah dan daerah kabupaten/kota;

- l. indikasi program dan kegiatan untuk pelaksanaan RP3KP yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas Daerah;
 - m. indikasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, termasuk rincian rencana pendanaan dan/atau pembiayaan, sumber pendanaan dan/atau pembiayaan;
 - n. daftar kawasan terlarang (negative list) untuk pembangunan atau pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - o. arahan mitigasi bencana;
 - p. pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pembangunan lintas program dan lintas daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - q. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (3) Penjabaran buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Kebijakan
 - c. Bab III : Gambaran Umum
 - d. Bab IV : Perumusan Konsep RP3KP
 - e. Bab V : Sinkronisasi RP3KP Provinsi Dengan RP3KP kabupaten/kota.
- (4) Album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. peta dasar dengan skala paling kurang 1 : 250.000;
 - b. peta kondisi eksisting;
 - c. peta analisis; dan

d. peta rencana dengan skala paling kurang 1: 25.000,- sampai dengan 1 : 50.000.

- (5) Buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Penyusunan RP3KP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada RTRW Provinsi.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RTRW Provinsi, maka RP3KP akan dilakukan perubahan.

BAB III

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RP3KP maka diberikan:
- a. insentif; dan
 - b. disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Pemerintah Daerah kepada badan hukum; atau
 - c. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:
- a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

b. pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yakni :

1. subsidi silang; dan/atau
2. kemudahan prosedur perizinan.

(4) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:

- a. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pengenaan retribusi daerah; dan/atau
- c. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan RP3KP Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat serta sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

membidangi urusan perumahan dan permukiman dan dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi terkait lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

DEVI KURNIA, SH.MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT:
(5/175/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2035

I. UMUM

Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan acuan/payung bagi seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman di daerah. Muatan pokok RP3KP di tingkat provinsi, merupakan acuan untuk mengatur dan mengkoordinasikan pembangunan perumahan dan permukiman khususnya yang menyangkut dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan.

Sedangkan dalam konteks penataan ruang, RP3KP merupakan penjabaran RTRW di sektor perumahan dan permukiman. RP3KP mencakup rencana penanganan sektor perumahan dan permukiman, baik yang terkait dengan peningkatan kualitas

lingkungan, revitalisasi/optimalisasi kawasan, maupun pengembangan kawasan baru yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar, termasuk prioritas implementasi dan rencana kebutuhan investasinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016 NOMOR 127

Berikut ini adalah kawasan strategis wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Penetapan kawasan strategis Propinsi dari sudut pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

- Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- Memiliki potensi ekspor;
- Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; atau
- Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Berikut ini adalah kawasan strategis di Propinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai ekonomi.

- 1) Kawasan Strategis ITBM
- 2) Kawasan Industri (KI)
- 3) Kawasan Strategis Poros Barat – Timur
- 4) Kawasan Strategis Tapus, Rao dan Mapat Tunggul
- 5) Kawasan Strategis Sungai Rumbai
- 6) Kawasan Strategis Silaut
- 7) Kawasan Strategis Pangkalan Koto Baru
- 8) Kawasan Strategis Kamang Baru
- 9) Kawasan Strategis Abao Sangir-Taluak Aie Putih

B. Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

- 1) Kawasan Strategis Ngarao Sianok di Kota Bukittinggi
- 2) Kawasan Strategis Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar
- 3) Kawasan Strategis Maninjau di Kabupaten Agam
- 4) Kawasan Strategis Danau Datar, Danau Dibawah dan Danau Talang di Kabupaten Solok

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

RASIO PNS



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
perkampertanahan.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 077 /DPRKPP/I-2018

Tentang

PENETAPAN PERSONIL DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat perlu ditetapkan staf dalam kelancaran pekerjaan Dinas.
 - b. bahwa Aparatur Sipil Negara dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 61 tahun 1958, tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1959.
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 26 tahun 2007.
 - 3. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 4. Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - 5. Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat
10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/3655/BKD-2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
11. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/073/BKD-2018, tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawasan (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
12. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 824/213/BKD-2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 824/3798/BKD-2017 tentang Pindah Pegawai Negeri Sipil .

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- : Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditempatkan pada Bidang – Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

Ke dua

- : Aparatur Sipil Negara tersebut dapat dimutasikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja / melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang – Undangan.

Ke tiga

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

Ke empat

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Padang
PADA TANGGAL : 15 Januari 2018



LAMPIRAN : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
 DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 077 /SK-DPRKPPA-2018
 TANGGAL : 15 JANUARI 2018

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	KET
1	Ir. CHANDRA MUSTIKA 19590815 195703 1 007	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	
2	YOLLY DETRA ASRAR. ST.MT 19721230 200112 2 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris Dinas	
3	EFNI USLINDA. ST.MEng 19690517 199703 2 005	Pembina (IV/a)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
4	JUTTA GUSMANIATI. B.Sc 19670811 199309 2 001	Penata (III/c)	Sekretaris Pimpinan	
5	RINA OKDRYANTI 19691024 1999403 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Persurutan	
6	VERA APRISUYENI. SE 19770402 201001 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Umum	
7	YUSMAINI 19690529 200701 2 003	Pengatur (III/c)	Pengelola Kepegawaian	
8	IRWAN PURWANTO 19690605 200701 1 012	Pengatur (III/c)	Pengelola Sarana dan Prasarana Dinas	
9	ZULFIANSI 19651108 200701 2 016	Pengatur (III/c)	Pengadministrasi Persurutan	
10	-	-	Pranata Arsip	
11	IRWANTO 19610112 200601 1 010	Pengatur (III/c)	Pengelola Barang Milik Negara	
12	ELFITRI OKTAVIA. ST 19781002 201101 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pj. Kasubag Keuangan dan Program	
13	RAMADAN NOPE. SE 19721102 200604 1 014	Penata (III/c)	Verifikasi Keuangan	
14	EDISON HELMI. ST 19711102 201001 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	
15	CICILIA RAHMA JUTTA. SE 19800718 201101 2 002	Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan Keuangan	
16	ELISA ADIANA. S.Kom 19890601 201502 2 001	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer	
17	Z E N. A.Md 19710926 200604 1 002	Penata Muda (III/a)	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	
18	AMAS MUDA. SE 19720817 200701 1 010	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran	
19	ERYANTO 19780311 200801 1 002	Pengatur (III/c)	Pengelola Gaji	
20	DAHRIL 19651102 200701 1 002	Juru (III/c)	Pengadministrasi Keuangan	
21	USRA DENI. ST 19680825 199303 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Perumahan Rakyat	
22	VIKY RAHMAT TIANDRA. ST 19840907 201101 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pj. Kasel Penyediaan Perumahan	
23	DANTAS. A.Md 19610808 200604 1 004	Pengatur Tk. I (III/d)	Analisa Perumahan	
24	DASRIAL 19720123 200701 1 004	Pengatur (III/c)	Juru Survey Permukiman Perumahan	
25	RAFDINAL 19690222 200701 1 003	Pengatur (III/c)	Pengadministrasi Umum	
26	EMA YULIS. ST 19630827 199703 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasir Pembiayaan Perumahan	
27	Ir. SYAFRUDDIN 19630530 199203 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Analisa	
28	EMILLIZA. ST	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisa	

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	KET
29	ZULFADU 19851110 200701 1 008	Pengatur (IIc)		
30	HENDRI 19830721 200812 1 001	Pengatur Muda Tk. I (IIb)		
31	GUSTINAWATI 19800823 198212 2 001	Penata Muda Tk. I (IIb)	Pengadministrasi Umum	
32	Ir. NOVIA 19831108 198202 2 001	Penata Tk. I (IIId)	Kasi Rehabilitasi Perumahan	
33	SRI HARMANITA ST 19830202 200902 2 001	Penata Muda (IIa)	Analisis Perumahan	
34	ALI ASMI ZESRA 19750713 200701 1 008	Penata Muda (IIa)	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	
35	WISNETTI 19710914 199403 2 003	Penata Muda Tk. I (IIb)	Pengadministrasi Umum	
36	SRIDANY. ST. MM 19820212 198203 1 008	Pembina Tk. I (IVb)	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	
37	Ir. ALEX RIZAL MM 19820809 198303 1 001	Pembina (IVa)	Kasi Penataan Permukiman Strategis dan Khusus	
38	ERHANTONI S.ST 19840622 198803 1 005	Penata Tk. I (IIId)	Analisis Penataan Kawasan	
39	EDMON DANTES 19801103 198803 1 008	Penata Muda Tk. I (IIb)	Juru Survey Permukiman Perumahan	
40	SYAHRAL 19850302 2007011 003	Pengatur (IIc)	Juru Survey Permukiman Perumahan	
41	ICHWANUL HAMDI 19770624 200812 1 001	Pengatur Muda Tk. I (IIb)	Juru Survey Permukiman Perumahan	
42	MURDIANTO 19830408 200212 1 001	Pengatur Tk. I (IIId)	Juru Survey Permukiman Perumahan	
43	ZULFIANDRI 19880215 198809 1 001	Pengatur (IIc)	Pengadministrasi Umum	
44	Ir. SYAHRIZAL 19810821 198308 1 001	Pembina Tk. I (IVb)	Kasi Prasarana, Prasarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman	
45	DESHENDRI S.Sos. MM 19881231 200604 1 059	Penata (IIc)	Pengelola Perumahan dan Permukiman	
46	NON RAMITA 19821218 198802 2 001	Penata Muda Tk. I (IIb)	Pengadministrasi Umum	
47	JOKO SISWOYO ST 19770820 200901 1 008	Penata (IIc)	Kasi Penataan Permukiman Kumuh	
48	LILI DARMI ST 19810823 198911 1 001	Penata Tk. I (IIId)	Analisis Penataan Kawasan	
49	MUHAMMAD AZHIR 19720218 200701 1 005	Penata Muda (IIa)	Pengawas Flek Permukiman	
50	YULIARTI 19800730 199103 2 001	Penata Muda Tk. I (IIb)	Pengadministrasi Umum	
51	DARMANSYAH SE. MM 19841223 198303 1 003	Pembina Tk. I (IVb)	Kepala Bidang Pertanahan	
52	NOVION MURDIN BA 19801214 198503 1 003	Penata Tk. I (IIId)	Kasi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokal Lintas Daerah	
53	WIRDAWATI SE 19891228 198203 2 008	Penata (IIc)	Analisis Kondisi Pertanahan	
54	DARWIZAR 19830805 198303 1 009	Penata Muda (IIa)	Pengadministrasi Umum	
55	ANTOS LUKMAN S.STP.MPA 19810530 199112 1 003	Penata (IIc)	Kasi Pengadaan Tanah Dinas Perumahan Rakyat	
56	PUSMA DEYAA TANTAWI S.STP 19820415 201408 1 006	Penata Muda (IIa)	Analisis Data Pengadaan Tanah	
57	ADE RIANI SANDRA 19731221 201408 2 004	Pengatur Muda (IIa)	Pengadministrasi Umum	

PEJABAT YANG TELAH
MEMENUHI PERSYARATAN
DIKLAT PIM

DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

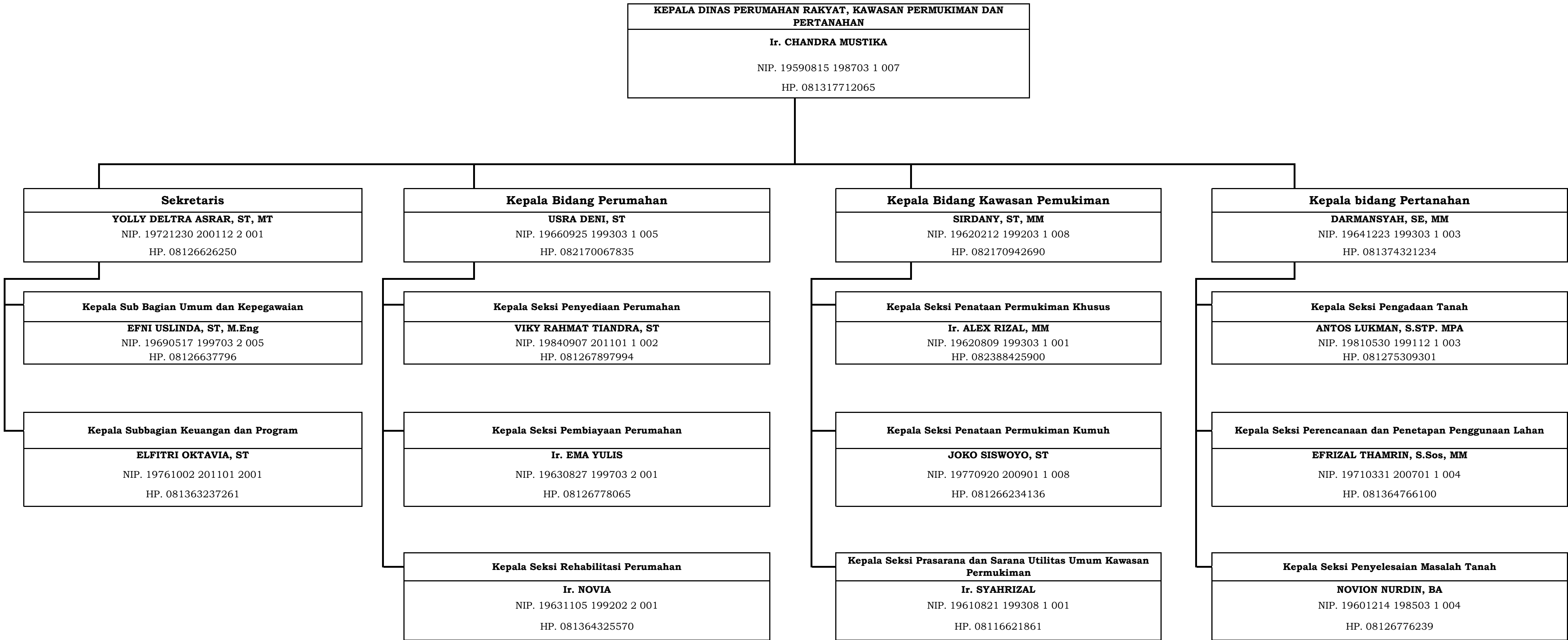
NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Ir. CHANDRA MUSTIKA NIP. 19590815 198703 1 007	Pembina Tk. I Gol. (IV/c)	Kepala Dinas
2	SIRDANY, ST, MM NIP. 19620212 199203 1 008	Pembina Tk. I Gol. (IV/b)	Sekretaris
3	YOLLY DETRA ASRAR, ST, MT NIP. 19721230 200112 2 001	Pembina Gol. (IV/a)	Kabid Kawasan Permukiman
4	USRA DENTI, ST NIP. 19660925 199303 1 005	Pembina Gol. (III/d)	Kabid Perumahan Rakyat
5	DARMANSYAH, SE, MM NIP. 19641223 199303 1 003	Pembina Tk. I Gol. (IV/b)	Kabid Pertanian
6	Ir. SYAFERJUS, M.Si NIP. 19610417 199403 1 001	Pembina Tk. I Gol. (IV/b)	Kepala UPTD Sampah Regional
7	DESHENDRI, S.Sos, MM NIP. 19663112 200604 059	Penata Gol. (III/c)	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	EFRIZAL THAMRIN, S.Sos, MM NIP. 19710331 200701 1 008	Penata Muda Tk. I Gol. (III/b)	Kasubag Keuangan dan Program
9	Ir. ALEX RIZAL, MM NIP. 19620809 199303 1 001	Pembina Gol. (IV/a)	Kasi Penataan Permukiman Strategis dan Khusus
10	EFNI USLINDA, ST, M.Eng NIP. 19690517 199703 2 005	Pembina Gol. (IV/a)	Kasi Prasarana, Prasarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman
11	Ir. Novia NIP. 1963110517 199703 2 001	Penata Tk. I Gol. (III/d)	Kasi Penataan Permukiman Kumuh
12	VIXY RAHMAT TIANDRA, ST NIP. 19840907 201101 1 002	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	Pj. Kasi Penyediaan Perumahan
13	ELFITRI OKTAVIA, ST NIP. 19761002 201101 2 001	Penata Muda Tk. I Gol. (III/b)	Pj. Kasi Rehabilitasi Perumahan
14	EMAYULIS, ST NIP. 19630827 199703 2 001	Penata Tk. I Gol. (III/d)	Kasi Pembiayaan Perumahan
15	NOVION MURDIN, BA NIP. 19601214 198503 1 004	Penata Tk. I Gol. (III/d)	Kasi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah
16	ANTOS LUKMAN, S.STP, MPA NIP. 19810530 199112 1 003	Penata Gol. (III/c)	Kasi Pengadaan Tanah Dinas Perumahan Rakyat
17	Ir. SYAHRIZAL NIP. 19610821 199308 1 001	Pembina Tk. I Gol. (IV/b)	Kasi Prasarana, Prasarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman
18	MASNAIDI, ST NIP. 19641112 199303 1 006	Penata Tk. I Gol. (III/d)	Kasubag Tata Usaha UPTD TPA Sampah Regional
19	ARMI B. ST, MDP NIP. 19690705 199401 1 001	Penata Tk. I Gol. (III/d)	Kasi Operasional dan Pemeliharaan pada UPTD TPA Sampah Regional
20	IRMAN, S.ST, MT NIP. 19720324 199202 1 001	Pembina Gol. (IV/a)	Kasi Usaha pada UPTD TPA Sampah Regional

Padang, 2017
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. CHANDRA MUSTIKA
NIP. 19590815 198703 1 007

RASIO STRUKTUR JABATAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA
BARAT**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2016 – 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dankarunia-Nya, sehingga telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat

Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.

Rencana Strategis ini merupakan program kegiatan lima tahunan dalam penyelenggaraan Keciaptakaryaan (Perumahan dan Permukiman) dan Pertanahan Sumatera Barat. Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis yang merupakan dokumen dan pedoman dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan tahun 2016 - 2021 dapat dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Dengan adanya rencana strategis ini, diharapkan program dan kegiatan lebih terarah dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur keciaptakaryaan semakin membaik di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian rencana kerja ini dapat memberikan manfaat dalam menunjang pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Padang , 2017

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sumatera Barat

Ir. CHANDRA MUSTIKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No.25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta

disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan. Tentunya sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan baik di perkotaan maupun di perdesaan kedepan akan semakin rumit, oleh karena itu maka untuk menjawab dan menghadapi tantangan ke depan perlu di susun sebuah Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam mewujudkan arah kebijakan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan. Pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan adalah menjadi sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat mencakup rumah sehat sederhana layak huni, prasarana dan sarana permukiman, jalan lingkungan serta penataan kawasan permukiman.

Sejalan dengan perkembangan zaman maka kawasan-kawasan permukiman dapat diperkirakan akan tumbuh dan berkembang secara tidak terencana dengan baik,

dan akan terlihat dari segi penataan bangunan, penempatan jalan dan fasilitas umum lainnya yang cenderung memanfaatkan tanah kosong tanpa mempertimbangkan aksesibilitas dan manfaatnya, ditambah kondisi sanitasi dengan utilitas yang buruk sehingga mencerminkan tata kehidupan yang kurang sehat dalam suatu kawasan permukiman.

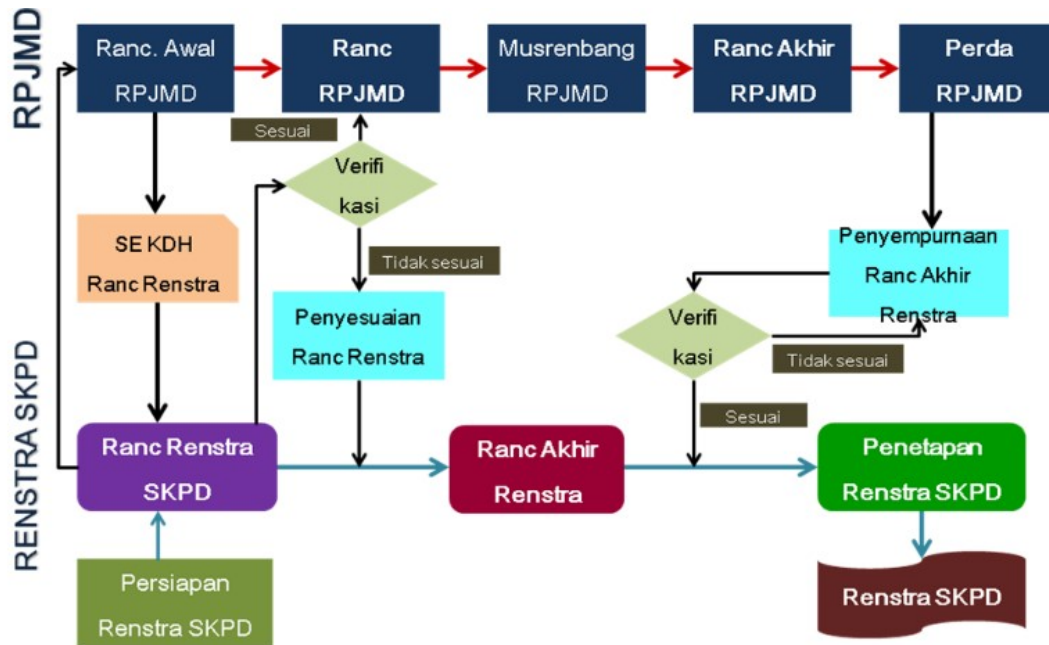
Untuk mempercepat tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dirasa perlu didukung oleh sumber daya yang memadai yang meliputi dana yang cukup, sumber daya manusia yang handal dan peralatan dan fasilitas pendukung lainnya yang memadai dengan menetapkan skala prioritas penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kondisi tersebut di atas menjadi tugas utama dan tantangan bagi Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan melalui penetapan Rencana Strategis OPD.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 –2021 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Secara rinci penyusunan dokumen Renstra dilakukan dengan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengolahan data dan informasi
 - a. Data dan informasi gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD); mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan OPD; (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya; (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam lingkup kewenangan OPD;
 - b. Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan OPD: mencakup (1) data pendapatan OPD; dan (2) data belanja OPD.
2. Analisis gambaran pelayanan OPD, terdiri dari :
 - a. Analisis gambaran umum pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD;

- b. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD.
- 3. *Review Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) yang mencakup:*
 - a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPera);
 - b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
- 4. *Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup :*
 - a. Tujuan dan sasaran RTRW;
 - b. Struktur dan pola ruang;
 - c. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
- 5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Stretegis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi OPD.
- 6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan :
- 7. Hasil analisis gambaran pelayanan OPD (potensi dan permasalahan pelayanan OPD);
- 8. Hasil review Renstra K/L;
- 9. Hasil penelaahan RTRW;
- 10. Hasil analisis dokumen KLHS;
- 11. Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD;
- 12. Perumusan visi dan misi OPD;
- 13. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD; dan
- 14. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD.

Adapun keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016 - 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana Gambar 1.1



Gambar 1.1
Keterkaitan Dan Tahapan Penyusunan Renstra OPD
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
5. Undang-Undang No. 26/ 2007 tentang Tata Ruang;
6. Undang-Undang No. 18/ 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang No. 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang No. 1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Undang-Undang No. 20/ 2011 tentang Rumah Susun;

10. Undang-Undang No. 2/ 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Undang-Undang No. 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. PP No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah;
14. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. PP No. 36/ 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Bangunan Gedung;
16. PP No. 39/2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. PP No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
19. PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. PP No. 26/ 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. PP No. 88/2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
22. Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 148/2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
23. Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
24. Instruksi Presiden No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13/2006;
27. Permendagri No. 54/2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
28. Permen PU No. 02/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015-2019;
29. Permen PUPR No. 38 tahun 2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum;
30. Permen PUPR No. 26/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
31. Permen PUPR No. 13/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
32. Permen PUPR No. 32/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
33. Peraturan Kepala BPN No. 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
34. Perda No. 6/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
35. Perda No. 6/2011 tentang Bangunan Gedung;
36. Perda No. 13/2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
37. Perda No. 7/2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035;
38. Perda No. 8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
39. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan UPTD TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat;
40. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat adalah untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dengan sasaran mengupayakan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Barat serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan antar wilayah guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah serta untuk meningkatkan profesionalisme, produktifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan infrastruktur Perumahan Permukiman perkotaan dan perdesaan serta Pertanahan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021 adalah :

1. Tersusunnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016-2021;
2. Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera barat selama periode tahun 2016-2021;
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (rencana kerja tahunan) Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dalam periode lima tahun ke depan;
4. Tersusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur
- 3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
- 3.3 Telaah RTRW dan KLHS
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi OPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

**BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD**

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, urusan wajib pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan meliputi :

1. Urusan Perumahan Rakyat
2. Urusan Kawasan Permukiman
3. Urusan Pertanahan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas.

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
5. Penyelenggaraan pengelolaan persampahan di UPTD TPA Sampah Regional.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibantu oleh Sekretariat, 3 (tiga) Bidang dan 1 UPTD dengan masing-masing uraian tugas sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Dengan rincian sebagai berikut :

- penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan, Rehabilitasi Perumahan dan Bangunan Gedung dan Rumah Negara. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan pembiayaan perumahan, rehabilitasi perumahan dan Bangunan Gedung dan Rumah Negara;
- melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan kepada kabupaten/kota yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
- melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
- melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh;
- menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perumahan Rakyat; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman, Penataan Permukiman Kumuh dan Permukiman Khusus. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Prasarana, Sarana, Utilitas Umum kawasan permukiman, penataan permukiman kumuh dan permukiman khusus;
- menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan bidang kawasan permukiman;
- menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan terkait bidang kawasan permukiman;

- menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan permukiman; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengadaan tanah, perencanaan dan penetapan penggunaan tanah dan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan tanah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan mengenai urusan perencanaan dan penetapan penggunaan tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan mengenai urusan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan
- menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan pertanahan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. UPTD TPA Sampah Regional

UPTD Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPTD TPA Sampah Regional mempunyai fungsi :

- Penyusunan Rencana Pembangunan Teknis Operasional Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional;

- Pengkajian dan Analisis Teknis Operasional Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional;
- Pengujian dan Persiapan Teknologi Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional;
- Pelaksanaan kebijakan teknis Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional;
- Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dengan bidang Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional;
- Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- Pelaksanaan Pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.

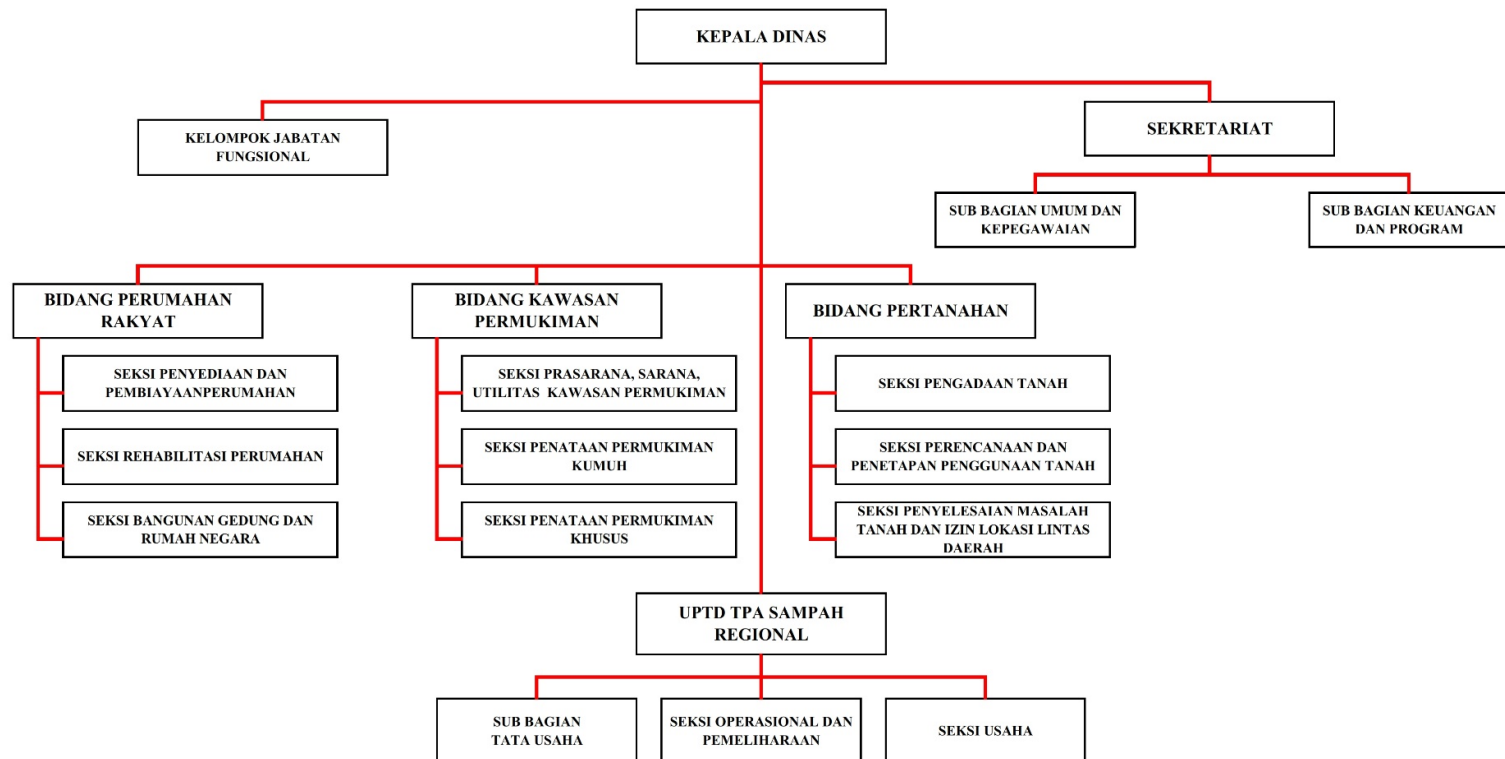
2.1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tersebut, dibentuk susunan organisasi Dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;
 - b. Seksi Rehabilitasi Perumahan; dan
 - c. Seksi Bangunan Gedung dan Rumah Negara.
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - a. Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Penataan Permukiman Kumuh; dan
 - c. Seksi Penataan Permukiman Khusus.
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengadaan Tanah;
 - b. Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; dan
 - c. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah.

6. UPTD TPA Sampah Regional, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Operasional dan Pemeliharaan; dan
 - c. Seksi Usaha.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 84 (delapan puluh empat) orang.



Gambar 2.1
Bagan Perbandingan Jumlah Pegawai Pria dan Wanita

Adapun rincian pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan eselon dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rincian Pegawai

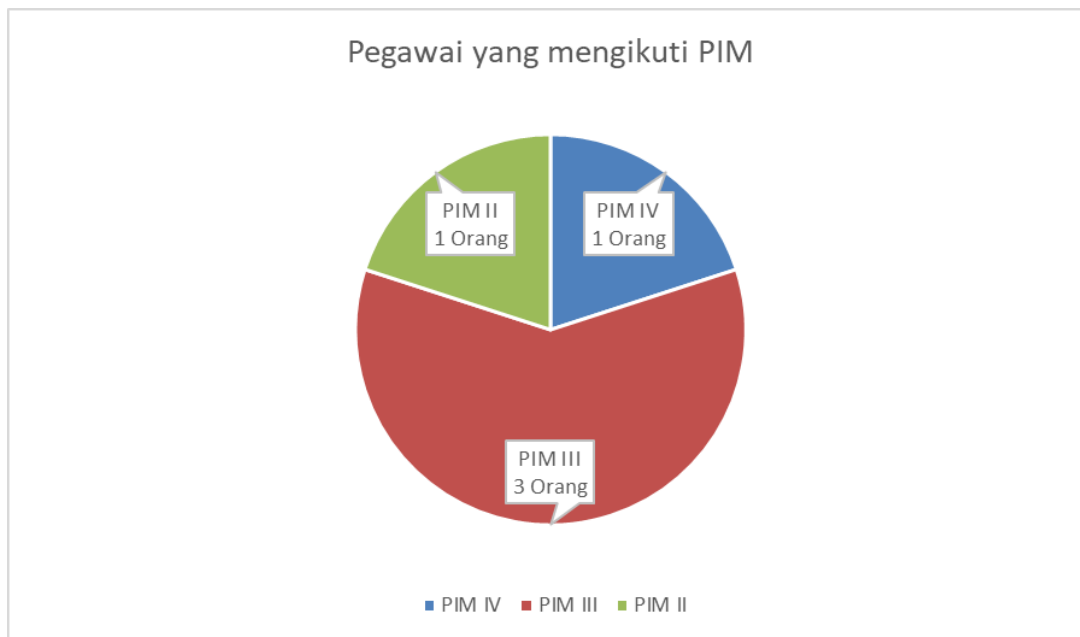
No.	RINCIAN PEGAWAI	JUMLAH (Orang)
		2017
I.	JENIS KELAMIN	84
1.	Pria	56
2.	Wanita	28
II.	PENDIDIKAN	
1.	Pasca Sarjana (S-2)	14
2.	Sarjana	
	S.1 (Teknis)	14
	S.1 (Non Teknis)	11
3.	Sarjana Muda	
	D.3 (Teknis)	2
	D.3 (Non Teknis)	3
4.	SLTA	38
5.	SLTP	3
6.	SD	-
III	ESELON	
1.	II	1
2.	III	5
3.	IV	14

Untuk menunjang pelaksanaan seluruh kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibutuhkan tenaga profesional yg berkompeten yg memiliki sertifikat keahlian seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Personil yang Memiliki Sertifikat Keahlian Tahun 2017

No	Jenis Sertifikat Keahlian	Jumlah pegawai (orang)
1.	Pengadaan Barang dan Jasa	22 Orang
2.	Pengelola Teknis Bangunan Gedung / Rumah Negara	4 Orang
3.	Brevet A dan B	6 Orang
4.	Arsiparis	4 Orang
5.	Ahli/ Manajemen Kebencanaan	1 Orang
6.	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	1 Orang

Untuk menjadi pejabat struktural diperlukan sertifikat penjenjangan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat telah memiliki sejumlah pegawai yang telah bersertifikat :



Gambar 2.2
Personil yang Memiliki Sertifikat Penjenjangan Karir 2017

2.2.2 Sumber Daya Non-Aparatur

1) Asset

Sumber Daya Non-Aparatur yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Asset yang berupa sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Peralatan unit UPTD TPA Sampah Regional

No.	Nama Alat	Jumlah
1.	Dump Truck 	3 Unit
2.	Bulldozer 	6 Unit

3.	<p>Excavator</p> 	5 Unit
4.	<p>Arm Roll Truck</p> 	1 Unit

5.	Belt Conveyor Pemilah Sampah	2 Set
		
6.	Pick Up Double Cabin	2
		

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Adapun kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021 mengacu pada pencapaian atas indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut capaian atas indikator tersebut.

- A. Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sekretariat

- 1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi

2. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi
3. Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan
4. Meningkatnya kualitas pengawasan internal organisasi

B. Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah

Bidang Perumahan Rakyat

1. Terfasilitasinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi
2. Terfasilitasinya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi
3. Persentase Rumah Layak Huni
4. Perkuatan Kelembagaan Bidang Perumahan dan Permukiman
5. Tersedianya Database perumahan

C. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah

Bidang Kawasan Permukiman

1. Meningkatnya penanganan kawasan kumuh di perumahan dan permukiman
2. Meningkatnya penanganan PSU di kawasan khusus
3. Meningkatkan PSU di kawasan perumahan bagi MBR Lintas Kabupaten/Kota

D. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat

UPTD TPA Sampah Regional

1. Meningkatnya infrastruktur TPA Sampah Regional

E. Mewujudkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)

Bidang Pertanahan

1. Tersedianya dokumen perencanaan Penggunaan Tanah dan penetapan penatagunaan tanah
2. Meningkatnya Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
3. Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan

Gambaran pencapaian Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2. 3 berikut ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun Ke - (%)					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	0	100	100	100	100										
2	Waktu penyampaian laporan	0	100	100	100	100										
3	Tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan organisasi	0	100	100	100	100										
4	Berkurangnya kesalahan hasil verifikasi keuangan	0	100	100	100	100										
5	Pemeriksaan terhadap organisasi	0	100	100	100	100										
6	Meningkatnya Rumah Layak Huni	0	80,2 3	81,8 9	83,5 6	85,2 3										
7	Pembangunan rumah baru	0	73	74	75	76										
8	Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani	0	73	74	75	76										
9	Jumlah PSU Kawasan Yang Tertangani	0	73	74	75	76										

No	Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun Ke - (%)					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
10	Tersedianya Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	0	85	85	87,5	90										
11	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum	0	85	85	87,5	90										
12	Berkurangnya masalah pertanahan	0	85	85	87,5	90										

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Dalam menyusun strategi digunakan metoda Analisa SWOT, merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor di dalam (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

2.4.1 Analisis Faktor Internal

Analisis Faktor Internal Rencana Pencapaian dan sasaran Infrastruktur Jalan Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (Strengths) dan kelemahan-kelemahan (Weaknesses). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

2.4.1.1. Kekuatan (Strenght)

- Tersedianya sumber material untuk pekerjaan konstruksi;
- Tersedianya Perda RP3KP Provinsi Sumatera Barat;
- Tersedianya pengelolaan sampah TPA Regional;
- Tersedianya Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;

2.4.1.2. Kelemahan (Weakness)

- Belum adanya data dasar perumahan dan kawasan permukiman ;
- Masih banyaknya kawasan kumuh yang belum tertangani;
- Masih terdapat Backlog rumah;
- Masih banyaknya terdapat Rumah Tidak Layak Huni;
- Terbatasnya lahan untuk pembangunan kawasan perumahan;

- Belum terdapatnya database perumahan dan kawasan permukiman;
- Terbatasnya pengembangan Penyediaan prasarana dan sarana utilitas Umum di Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan;
- Belum tersedianya Perda tentang Pengelolaan Sampah Regional;
- Belum tersedianya Perda tentang Retribusi Sampah;
- Belum tersedianya Kelembagaan SPAM Regional;
- Belum tersedianya Kelembagaan Limbah Regional;
- Belum lengkap dan sinkronnya regulasi tentang NSPK Pengelolaan Pertanahan;
- Sumber air baku yang tidak merata di setiap Kabupaten/Kota.

2.4.2. Analisis Faktor Eksternal

Analisis faktor eksternal terkait penanganan rumah, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk mengidentifikasi peluang-peluang (opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) yang ada terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro yaitu sebagai berikut:

2.4.2.1. Peluang (Opportunity)

- Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;
- Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;
- Adanya teknologi konstruksi yang ramah gempa
- Tersedianya kesempatan tugas belajar untuk meningkatkan pendidikan formal.

2.4.2.2. Ancaman (Threats)

- Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;
- Seringnya bencana alam yang mengancam konstruksi gedung, perumahan dan infrastruktur lainnya.
- Lebih dari 60 % luas wilayah Sumatera Barat merupakan kawasan hutan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.
- Masih tinggi jumlah kawasan kumuh.
- Makin meluasnya daerah genangan air.

- kurangnya tenaga ahli dan tenaga terampil yang bersertifikat.
- tingginya produksi sampah diperkotaan.
- Meningkatnya konflik sengketa pertanahan.

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Optimalkan peluang mengikuti pendidikan teknis, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dibidang konstruksi;
2. Mengoptimalkan kinerja pegelola sampah dengan dana yang tersedia dan keterbatasan lahan dengan cara membangun dan mengoperasi TPA regioanal guna menangani produksi sampah yang makin meningkat di perkotaan;
3. Mengoptimalkan ketersediaan sumber air baku untuk meningkatkan pelayanan air minum guna memenuhi sambungan rumah (SR) diperkotaan, perdesaan, dan daerah rawan air;
4. Mengoptimalkan pengelolaan air limbah untuk mengatasi meluasnya daerah genangan;
5. Mengoptimalkan peningkatan jumlah renovasi rumah tidak layak huni dan PSU untuk mengurangi kawasan kumuh;
6. Mengoptimalkan bantuan FLPP bagi MBR untuk mengatasi backlog perumahan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.1.1 Perumahan Rakyat

- Kurangnya kemampuan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau
- Keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan perumahan bagi MBR
- Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*).
- Keterbatasan kapasitas pengembang (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
- Rendahnya keterjangkauan (*affordability*) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).
- Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (*urban area*) terkendala dengan proses pengadaan lahan.

3.1.2 Kawasan Permukiman

- Masih adanya kawasan kumuh.
- Masih belum tersedianya data kawasan permukiman.
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penyediaan air minum.
- Masih rendahnya kinerja lembaga pengelolaan air minum.
- Terbatasnya pendanaan penyediaan air minum.
- Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku.
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang air minum

- Masih rendahnya cakupan pelayanan air limbah.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam prasarana air limbah.
- Masih rendahnya kinerja lembaga pengelolaan air limbah.
- Terbatasnya pendanaan penyediaan air limbah.
- Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku.
- Masalah TPA (99 % open dumping) karena keterbatasan Lokasi dapat menyebabkan pencemaran leachate, pencemaran gas/kebakaran dan kecelakaan akibat berkurangnya keselamatan manusia.
- Aturan persampahan mensyaratkan rehabilitasi TPA open dumping menjadi controlled landfill /sanitary landfill dalam tahun 2012
- Peran operator/regulator yang tidak jelas
- Keterbatasan Dana : Investasi, Organisasi & Manajemen, Tipping Fee rendah
- Perlu kerjasama pengelolaan sampah secara terpadu oleh beberapa pemerintah daerah dalam rangka memecahkan permasalahan penyediaan lahan Pengolahan akhir sampah di kota besar dan metropolitan
- Perlunya pengurangan sampah di sumbernya di mana fasilitasi pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong resource recovery dan daur ulang sampah
- Pembangunan prasarana dan sarana drainase mempunyai fungsi sebagai saluran pembuang air hujan dan disisi lain sebagai pengatur limpahan air (banjir).
- Sistem drainase makro dan mikro untuk penanggulangan genangan di permukiman harus merupakan subsistem pengendalian banjir regional.
- Pengelolaan siklus air merupakan bagian yang perlu didukung oleh kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase sehingga berfungsi maksimal.
- Tidak tersedianya dana memadai, karena selama ini operasional dan pemeliharaan drainase bukan prioritas utama, karena tidak diketahuinya kebutuhan nyata dana operasional dan penyelenggaraan drainase.
- Belum terintegrasinya penyelenggaraan drainase dengan sektor lainnya sehingga kurang perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran.
- Meningkatnya pencemaran lingkungan di saluran drainase.

- Lemahnya institusi pengelola prasarana dan sarana drainase karena tidak jelasnya wewenang pemerintah daerah dalam masalah drainase.
- Tingkat kepedulian komunitas masih rendah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak huni.
- Kurangnya perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran.

3.1.3 Pertanahan

- Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan.
- Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar.
- Masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal yang diatur secara adat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Barat.

VISI Gubernur Sumatera Barat yaitu :

TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA

Sedangkan Misi Gubernur Sumatera Barat yaitu :

1. *Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";*
2. *Meningkatkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;*
3. *Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;*
4. *Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, & berdaya saing regional dan global, menjadi Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat;*
5. *Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.*

Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Misi ke 5 **Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.** Seiring dengan harapan tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk mampu mengefektifkan visi pembangunan sumbar tahun 2016 - 2021 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No. 78 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas.

Sesuai dengan misi 5 tersebut, ada beberapa isu strategis terkait Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana/infrastruktur serta pelayanan transportasi publik
- Melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelestarian lingkungan

Tabel 3.1

Hubungan Antara Visi, Misi ke 5, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Gubernur dengan Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan Sejahtera
MISI 5	: Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Meningkatnya Prasarana Umum pada kawasan pemukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan,	1. Meningkatkan kawasan permukiman yang asri, bersih dan nyaman melalui pengembangan dan pengelolaan air minum dan sanitasi	1. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh.
			2. Pengembangan SPAM regional, TPA Regional, Drainase kewenangan provinsi.
			3. Meningkatkan kualitas dan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi

Tabel 3.2
Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Kebijakan Umum dan Program Prioritas Gubernur dengan Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Prioritas
Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh 2. Pembentukan SPAM dan Pengolahan Limbah Regional, Pengembangan TPA Regional, dan Drainase kewenangan Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset 7. Pengembangan Perumahan 8. Pemberdayaan Komunitas Perumahan 9. Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan 10. Pengelolaan Pertanahan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi besarnya kesenjangan antar-kawasan nusantara: antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, antara kota Jakarta dan kota-kota lainnya. Fenomena yang terkait adalah urbanisasi yang cukup tinggi. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi ini belum disertai oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk oleh urbanisasi tersebut maupun *backlog* yang telah ada sebelumnya. Demikian juga ketersediaan infrastruktur belum merata ke semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

3.3.1 Infastruktur Permukiman

1. Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi
2. pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana (bisa merupakan dampak tidak langsung dari desentraliasi)
3. Kerusakan lingkungan hidup
4. Perubahan Iklim dan bencana alam
5. Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial

3.4 Telaahan RTRW Provinsi dan KLHS

3.4.1 Pengembangan Prasarana Wilayah dengan Dukungan Infrastuktur.

Keterpaduan pola ruang Provinsi Sumatera Barat melalui Pengembangan potensi Sumber daya alam dengan tetap memperhatikan ekosistem alam dan daya dukung wilayah secara berkelanjutan

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan Provinsi Sumatera Barat
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah
3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kota metropolitan

5. Penetapan dan Peningkatan Kota Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan, dan Simpang Empat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan, Lubuk Alung, Parik Malintang, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping, Sarilamak, Kota Padang Panjang, Batusangkar, Muaro Sijunjung, Aro Suka, Padang Aro, dan Tuapejat untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan
6. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah
7. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan
8. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah

Pola Tata Ruang membagi seluruh aktifitas kehidupan ke dalam sebuah bentuk yang saling ketergantungan. Jaringan jalan mempunyai peran ganda dalam pola struktur Tata Ruang yaitu sebagai prasarana pergerakan barang dan penumpang juga sebagai pemersatu seluruh aktivitas.

Kawasan permukiman memerlukan jaringan jalan untuk mobilitas penghuninya begitu pula kawasan pertanian, perkebunan, perindustrian dan lain – lain aktivitas produksi.

Keberadaan Bukit Barisan yang membelah Provinsi Sumatera Barat menjadi bagian Barat dan Timur dengan kawasan hutan yang menguasai lebih kurang 64 % wilayah Sumatera Barat, menjadi kendala utama dalam pengembangan wilayah.

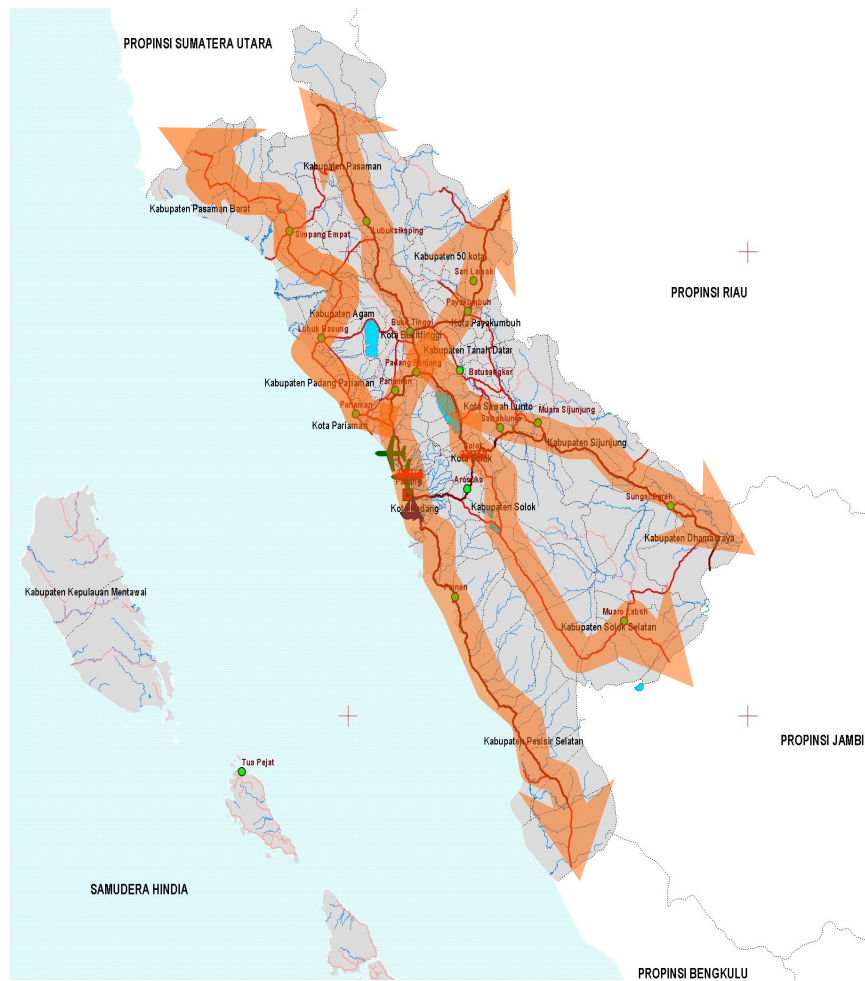
Secara umum letak Kabupaten/Kota di bagi atas daerah Pesisir Pantai seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagian wilayah Kabupaten Agam, serta Kabupaten Kota yang pada lereng Bukit Barisan seperti Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten

Darmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman dan satu Kabupaten lepas pantai yaitu Kabupaten Mentawai.

Berada dalam patahan semangko ± 600 Km garis pantai menjadikan Provinsi ini menjadi rawan gempa dan rawan Tsunami, keterbatasan pemanfaatan ruang untuk aktifitas ekonomi karena hanya $\pm 36\%$ luas wilayah yang dapat dibudidayakan, sehingga diperlukan analisa daya dukung dan daya tampung untuk mendapatkan pola ruang yang efektif dan efisien.

3.4.2 Skema Hubungan Antara Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota yang lain.

Hubungan antara Kabupaten Kota dibentuk dengan system jaringan jalan antara Provinsi (Jalan Nasional) dan antara Kabupaten/Kota (Jalan Provinsi) serta di lingkungan Kabupaten/Kota itu sendiri (Jalan Kabupaten/Kota) Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi telah terhubung dengan 18 Ibu Kota Kabupaten/Kota.



Gambar 3.1
Peta Gagasan Pembentukan Struktur Ruang

Pembentukan Struktur Ruang didasari atas pola jaringan jalan yang telah ada, maka untuk pengembangan prasarana wilayah perlu dibangun/ditingkatkan dan beberapa ruas jalan antara lain :

1. Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dahrmasraya: Ruas Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang-Kiliran Jao.
2. Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Batas Riau: Ruas Jalan Batas Riau-Panti-Simpang Empat-Air Balam-Teluk Tapang.
3. Peningkatan Daya Dukung Jalan dari Kabupaten Solok menuju Kabupaten Solok Selatan dan Perbatasan Provinsi Jambi: Ruas Jalan Lubuk Selasih-Padang Aro-Sungai Penuh.
4. Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya : Ruas Jalan Padang Aro-Lubuk Malako-Pulau Punjung.

5. Perkuatan sistem jaringan jalan Kota Padang-Pariaman-Tiku-Sasak-Bunga Tanjung.
6. Peningkatan Jalan Padang Sawah-Kumpulan
7. Penambahan kapasitas jaringan jalan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi: Ruas Padang By Pass-Buayan-Sicincin-Koto Mambang-Balingka-Ngarai Sianok-Jembatan Ngarai Sianok-Bukittinggi By Pass.
8. Penambahan Kapasitas Jalan Balingka-Matur-Palembayan-Padang Koto Gadang Kabupaten Agam.
9. Peningkatan kapasitas jalan mendukung pola pengembangan perdagangan dan pertanian, dan perkebunan : Ruas Bukittinggi-Payakumbuh-Batas Riau termasuk penyelesaian Jembatan Kelok 9.
10. Pembangunan Jalan antara Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan : Ruas Jalan Teluk Kabung-Mandeh-Tarusan.

3.4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Prasarana lingkungan ini digunakan antar wilayah melalui berbagai mekanisme kerjasama. Pengembangan sistem prasarana lingkungan ini sebagai upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu di kembangkan lokasi yang digunakan bersama antar kabupaten/kota dengan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan.

Prasarana lingkungan terdiri atas :

- a. Tempat Pengolahan akhir (TPA) terpadu Regional
- b. Tempat pengolahan dan atau pengelolaan limbah industri B3 dan non B3.
- c. Sistem drainase
- d. Sistem pengelolaan air minum (SPAM)
- e. Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat

Lokasi pengembangan TPA terpadu harus didasari oleh kesepakatan dan kerjasama antar wilayah, dan dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang persampahan.

Sistem prasarana lingkungan sebagaimana yang dimaksud di atas ditetapkan dengan kriteria mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Pada bagian ini akan dijelaskan isu-isu strategis kegiatan pembangunan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, dimulai dari Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengacu dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3.5.1 Isu Strategis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Isu-Isu Strategis Perumahan Rakyat

- Kurangnya kemampuan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau
- Keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan perumahan bagi MBR
- Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand).
- Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
- Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).
- Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (urban area) terkendala dengan proses pengadaan lahan.

Isu-Isu Strategis Kawasan Permukiman

- Masih adanya kawasan kumuh.
- Masih belum tersedianya data kawasan permukiman.
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penyediaan air minum.
- Masih rendahnya kinerja lembaga pengelolaan air minum.

- Terbatasnya pendanaan penyediaan air minum.
- Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku.
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang air minum
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air limbah.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam prasarana air limbah.
- Masih rendahnya kinerja lembaga pengelolaan air limbah.
- Terbatasnya pendanaan penyediaan air limbah.
- Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku.
- Masalah TPA (99 % open dumping) karena keterbatasan Lokasi dapat menyebabkan pencemaran leachate, pencemaran gas/kebakaran dan kecelakaan akibat berkurangnya keselamatan manusia.
- Aturan persampahan mensyaratkan rehabilitasi TPA open dumping menjadi controlled landfill /sanitary landfill dalam tahun 2012
- Peran operator/regulator yang tidak jelas
- Keterbatasan Dana : Investasi, Organisasi & Manajemen, Tipping Fee rendah
- Perlu kerjasama pengelolaan sampah secara terpadu oleh beberapa pemerintah daerah dalam rangka memecahkan permasalahan penyediaan lahan Pengolahan akhir sampah di kota besar dan metropolitan
- Perlunya pengurangan sampah di sumbernya di mana fasilitasi pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong recourse recovery dan daur ulang sampah
- Pembangunan prasarana dan sarana drainase mempunyai fungsi sebagai saluran pembuang air hujan dan disisi lain sebagai pengatur limpahan air (banjir).
- Sistem drainase makro dan mikro untuk penanggulangan genangan di permukiman harus merupakan subsistem pengendalian banjir regional.
- Pengelolaan siklus air merupakan bagian yang perlu didukung oleh kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase sehingga berfungsi maksimal.
- Tidak tersedianya dana memadai, karena selama ini operasional dan pemeliharaan drainase bukan prioritas utama, karena tidak diketahuinya kebutuhan nyata dana operasional dan penyelenggaraan drainase.

- Belum terintegrasinya penyelenggaraan drainase dengan sektor lainnya sehingga kurang perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran.
- Meningkatnya pencemaran lingkungan di saluran drainase.
- Lemahnya institusi pengelola prasarana dan sarana drainase karena tidak jelasnya wewenang pemerintah daerah dalam masalah drainase.
- Tingkat kepedulian komunitas masih rendah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak huni.
- Kurangnya perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran.

Isu-Isu Strategis Pertanahan

- Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan.
- Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi - Misi

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai, untuk menjalankan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Gubernur Sumatera Barat , yaitu :

“Mewujudkan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola Pertanahan yang Berkeadilan”

Permukiman yang **layak huni dan berkelanjutan** dapat diterjemahkan melalui permukiman dengan cakupan pelayanan air bersih yang baik, penurunan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri.

Berdasarkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan Tatakelola Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
2. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman;
3. Meningkatkan Kualitas Perumahan;

4. Meningkatkan Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan;
- b) Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- c) Menyelenggarakan dan memfasilitasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan;
- d) Menyelenggarakan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan; dan
- e) Mewujudkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan).

4.2.2 Sasaran

- a) Meningkatnya tata kelola organisasi;
- b) Meningkatkan permukiman yang layak;
- c) Meningkatnya kualitas perumahan
- d) Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan;
- e) Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman;
- f) Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA Sampah Regional
- g) Meningkatkan Fasilitas Pengadaan Tanah bagi pembangunan, penatagunaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan	Meningkatnya tata kelola organisasi	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai LAKIP OPD (minimal BB)	BB	BB	B	B	AA	AA

			Persentase tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	1	1	1	1	1	1
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Meningkatnya rumah layak huni	Terfasilitasinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	0%	0%	25%	25%	25%	100%
			Terfasilitasinya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	0%	0%	25%	25%	25%	100%

			Persentase Rumah Layak Huni		15%	20%	25%	30%	100%
			Perkuatan Kelembagaan Bidang Perumahan dan Permukiman		15%	20%	25%	30%	100%
			Tersedianya Database perumahan	11%	16%	21%	26%	26%	100%
			Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah	0%	0%	25%	25%	25%	100%
3	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Penurunan kawasan kumuh	16,50%	15,50%	14,50%	13,50%	12,50%	11,50%
			Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi		30,00%	30,01%	30,02%	30,03%	30,04%
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional	Meningkatnya infrastruktur TPA Sampah Regional	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit

5	Mewujudkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah	Tersedianya dokumen perencanaan Penggunaan Tanah dan penetapan penatagunaan tanah	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen
		Terwujudnya tertib pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Meningkatnya Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	79%	80,5%	82%	83,5%	85%	85%
		Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah tanah dan Penetapan Tanah Ulayat	Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan	80%	85%	85%	87,5%	90%	90%

4.3 Strategi Dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut.

Sasaran 1: Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas dan budaya organisasi yang berkinerja tinggi

Strategi : Meningkatkan integritas dan kompetensi ASN.

Kebijakan :

1. Mengirim ASN untuk mengikuti diklat.
2. Meningkatkan pendidikan formal ASN.

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas perumahan

Strategi :

1. Meningkatnya rumah layak huni
2. Meningkatnya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi dan korban bencana provinsi.

Kebijakan :

1. Menyusun database perumahan.
2. Menyusun NSPK pembiayaan perumahan.
3. Melakukan penguatan kelembagaan bidang perumahan.
4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan.

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

Strategi :

1. Mengurangi luasan kawasan kumuh.
2. Meningkatkan kualitas PSU permukiman.

Kebijakan :

1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman.

3. Menyusun SPM kawasan permukiman.
4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman.

Sasaran 4: Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA sampah regional Provinsi Sumatera Barat

Strategi :

Menyediakan Sarana, Prasarana Pengelolaan Persampahan Regional.

Kebijakan :

1. Melaksanakan Pengelolaan TPA Sampah Regional.
2. Menyiapkan Regulasi tentang Pengelolaan dan Retribusi Jasa Pemrosesan Sampah.

Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah

Strategi :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan rencana dan penetapan penatagunaan tanah.
2. Mendorong pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah yang inklusif, seimbang dan terpadu.

Kebijakan :

1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah.
2. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Penatagunaan Tanah.
3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perencanaan Penggunaan Tanah.

Sasaran 6: Terwujudnya Tertib Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Strategi :

1. Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para *stakeholders* tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kebijakan :

1. Memfasilitasi Penanganan Masalah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
2. Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Sasaran 7: Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan

Strategi :

1. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan
2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarsasi masalah pertanahan.

Kebijakan :

1. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan
2. Memfasilitasi Penyelesaian dan Penetapan Tanah Ulayat
3. Memfasilitasi Pemberian Izin Lokasi
4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Masalah Pertanahan.

Tabel 4.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD 2016-2021

Visi	Mewujudkan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola Pertanahan yang Berkeadilan
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan; 2. Mempercepat pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, serasi, seimbang, layak huni, baik diperkotaan maupun dipedesaan; 3. Mewujudkan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan; dan 4. Meningkatkan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas dan budaya organisasi yang berkinerja tinggi	Meningkatkan integritas dan kompetensi ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirim ASN untuk mengikuti diklat. 2. Meningkatkan pendidikan formal ASN.
Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan iklim yang kondusif serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan. 2. Meningkatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun database perumahan. 2. Menyusun NSPK pembiayaan perumahan. 3. Melakukan penguatan kelembagaan bidang perumahan. 4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan.
Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi luasan kawasan kumuh. 2. Meningkatkan kualitas PSU permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman. 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			3. Menyusun SPM kawasan permukiman. 4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman
Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional	Menyediakan Sarana, Prasarana Pengelolaan Persampahan Regional	1. Melaksanakan Pengelolaan TPA Sampah Regional. 2. Menyiapkan Regulasi tentang Pengelolaan dan Retribusi Jasa Pemrosesan Sampah.
Mewujudkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah	1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan rencana dan penetapan penatagunaan tanah. 2. Mendorong pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah yang inklusif, seimbang dan terpadu	1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah. 2. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Penatagunaan Tanah. 3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perencanaan Penggunaan Tanah.
	Terwujudnya tertib pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	1. Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para stakeholders tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum 2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	1. Memfasilitasi Penanganan Masalah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. 2. Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
	Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah tanah dan Penetapan Tanah Ulayat	1. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan 2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarsasi masalah pertanahan.	1. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan 2. Memfasilitasi Penyelesaian dan Penetapan Tanah Ulayat 3. Memfasilitasi Pemberian Izin Lokasi 4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Masalah Pertanahan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur dengan mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian renstra 2016 - 2021 dilandasi dengan Indikator Kinerja maka dilakukan penyusunan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Pendanaan sebagai berikut:

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Secara garis besar Program dan Kegiatan yang disusun terdiri dari :

- a. Melanjutkan Kegiatan-Kegiatan yang belum selesai pada RPJMD tahun 2010 - 2015
- b. Menyusun Program dan Kegiatan baru RPJMD tahun 2016 - 2021

Program-program tersebut meliputi:

- 1. APBD**
- 2. APBN**

Uraian sebagai berikut :

1. PROGRAM DINAS MELALUI DANA APBD

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :**
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :**
 - Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan perlengkapan kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - Pengadaan Meubelier

- **Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :**
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :**
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

- **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :**
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
 - Penatausahaan Keuangan OPD

- **Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset**
 - Penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD
 - Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD
 - Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD

- **Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan :**
 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyediaan Perumahan di Sumatera Barat
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan di Sumatera Barat
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - Fasilitasi Perda Dokumen Penyediaan perumahan Kabupaten Kota
 - Penyusunan NSPK Pengembangan Perumahan
 - Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan
 - Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
 - Sosialisasi Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam
 - Workshop Rumah Aman Bencana
 - Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang/Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah
 - Fasilitasi Penyediaan dan Reabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi
 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Yang Terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

- **Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan kegiatan :**
 - Pembuatan SPAM Regional
 - Pembuatan IPLT Regional
 - Koordinasi dan Evaluasi Program Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat
 - Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi
 - Stimulasi Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)
 - Penyusunan SPM Kawasan Permukiman
 - Fasilitasi dan Sosialisasi Program Kawasan Permukiman
 - Pendataan Kawasan Permukiman di Sumatera Barat
 - Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)

- Stimulasi Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus
- Pembuatan Drainase lintas Kabupaten/Kota
- Penyusunan Perda Persampahan Provinsi Sumatera Barat
- Penyusunan Master Plan Persampahan Provinsi Sumatera Barat
- Penyusunan dokumen kerjasama pengelolaan sampah dengan instansi/kab/kota penghasil sampah
- Sosialisasi persampahan terhadap Kelompok Masyarakat
- Pengelolaan Sampah 3 R Berbasis Masyarakat

- **Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**
 - Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional
 - Peningkatan pembangunan Infrastruktur TPA Regional
 - Pemantauan lingkungan kawasan TPA Sampah Regional

- **Program Pengelolaan Pertanahan**
 - Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah
 - Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
 - Bimtek Perencanaan Penatagunaan Tanah
 - Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - Bimtek Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - Inventarisasi dan Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat
 - Sosialisasi Pengaturan dan Penetapan tanah Ulayat
 - Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat
 - Inventarisasi dan Penyelesaian Masalah Pemanfaatan Tanah Kosong, Redistribusi Tanah, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

- Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi
- Bimtek Penanganan Masalah Pertanahan

2. PROGRAM DINAS MELALUI DANA APBN

- SNVT Penyediaan Perumahan.

5.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah gambaran hasil-hasil utama yang mengacu kepada manfaat (*outcome*) dari hasil sasaran kegiatan.

1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran
2. Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur
3. Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas
Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Persentase rata-rata lamanya PNS mengikuti Diklat
Terciptanya Peningkatan SDM Aparatur
5. Persentase tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja OPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD (LAKIP, LKPJ dan LPPD)
6. Persentase tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan
Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan
7. Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD
Kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD

8. Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD
Kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD
9. Persentase tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit OPD
Terlaksananya Kelancaran Penatausahaan Keuangan OPD
10. Terfasilitasinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi
Terlaksananya penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi
11. Terfasilitasinya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi
Terlaksananya fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi
12. Persentase Rumah Layak Huni
Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di 19 Kabupaten/Kota
13. Perkuatan Kelembagaan Bidang Perumahan dan Permukiman
Terlaksananya Sosialisasi Penguatan dan Pembinaan kepada POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
14. Tersedianya Database Perumahan
Tersusunnya Database Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah
Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi kepada Orang/Badan Usaha Yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan di Bidang Perumahan

16. Penurunan kawasan kumuh

Adapun indikator tercapainya penurunan kawasan kumuh secara kuantitatif adalah penurunan persentase kawasan dari 17,5% pada tahun 2015 menjadi 11,5% pada akhir 2021.

17. Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi

Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi menjadi 30,04% pada Tahun 2021.

18. Perda Persampahan

Tersusunnya Dokumen Perda Persampahan.

19. Masterplan Persampahan

Tersusunnya Dokumen Masterplan Persampahan.

20. Dokumen kerjasama pengelolaan sampah dengan instansi/kab/kota penghasil sampah

Tersusunnya Dokumen kerjasama pengelolaan sampah dengan instansi/kab/kota penghasil sampah.

21. Jumlah kelompok masyarakat di kab/kota yang diberikan penyuluhan/ sosialisasi persampahan

Pemberdayaan kelompok masyarakat di kab/kota yang diberikan penyuluhan/ sosialisasi persampahan

22. Jumlah kelompok masyarakat yang dikutsertakan dalam kegiatan usaha pengolahan sampah di TPA Sampah Regional

Pemberdayaan kelompok masyarakat yang dikutsertakan dalam kegiatan usaha pengolahan sampah di TPA Sampah Regional

23. Meningkatnya infrastruktur TPA Sampah Regional

Meningkatnya pelayanan persampahan di TPA Sampah Regional dari 2 TPA dikondisi awal, menjadi 4 TPA pada akhir tahun 2021.

24. Tingkat akurasi, kecermatan dan kesesuaian perencanaan dan penetapan penggunaan tanah

Tersedianya dokumen perencanaan Penggunaan Tanah dan penetapan penatagunaan tanah

25. Ketersedian informasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Meningkatnya Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

26. Persentase masalah tanah yang difasilitasi

Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan

Pendanaan Indikatif

Dalam proses penyusunan program, kegiatan, lokasi dan pendanaan indikatif yang termuat dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5.1) disusun berdasarkan evaluasi kinerja Renstra Tahun 2010 – 2015, proyeksi kebutuhan dan target yang akan dicapai, serta skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun program dan kegiatan bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan perubahan yang terjadi selama tahun pelaksanaan Renstra.

Dalam pelaksanaannya, pendanaan dalam kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersumber dari alokasi dana APBD, APBN dan PHLN. Secara lebih lengkap program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja OPD menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 6. 1
Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	
1	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas dan budaya organisasi yang berkinerja tinggi	a.	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b.	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c.	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		d.	Persentase rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		e.	Persentase tingkat kesesuaian pelaporan		100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	
			capaian kinerja pada unit kinerja OPD							
		f.	Nilai LAKIP OPD (minimal BB)		BB	BB	B	B	AA	AA
		g.	Persentase tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		h.	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		i.	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		j.	Persentase tingkat pengelolaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	
			keuangan daerah pada unit OPD							
2	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	a.	Terfasilitasinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b.	Terfasilitasinya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi		0%	0%	25%	25%	25%	100%
		c.	Persentase Rumah Layak Huni		0%	0%	25%	25%	25%	100%
		d.	Perkuatan Kelembagaan Bidang		0%	15%	20%	25%	30%	100%

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	
			Perumahan dan Permukiman							
		e.	Tersedianya Database perumahan		0%	15%	20%	25%	30%	100%
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	a.	Penurunan kawasan kumuh	17,50%	16,50%	15,50%	14,50%	13,50%	12,50%	11,50%
		b.	Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi			30,00%	30,01%	30,02%	30,03%	30,04%
4	Tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional	a.	Meningkatnya infrastruktur TPA Sampah Regional		20%	40%	60%	80%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas perencanaan	a.	tingkat akurasi, kecermatan dan kesesuaian	0%	0%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	
	dan penetapan penatagunaan tanah yang partisipatif, serasi seimbang dan terpadu		perencanaan dan penetapan penggunaan tanah							
6	Terwujudnya tertib pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	a.	ketersedian informasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	79%	79%	80,50%	82%	83,50%	85%	85%
7	Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah tanah dan penetapan tanah ulayat	a.	persentase masalah tanah yang difasilitasi	80%	80%	85,00%	85%	87,50%	90%	90%

Adapun rencana target program prioritas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 6.2

Tabel 6. 2
Indikasi Target Capaian Kinerja Program Berdasarkan Program Prioritas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					T	T	T	T	T	T	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	%				100%	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur	%				100%	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur	%				100%	100%	100%	100%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya Peningkatan SDM Aparatur	%				100%	100%	100%	100%	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan	%				100%	100%	100%	100%	

NO	URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					T	T	T	T	T	T	
	Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan	%				100%	100%	100%	100%	
	Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	Unit	2.000,00			500	500	500	500	
		Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Unit	250,00			60	60	60	70	
		Persentase rumah layak huni	%	76,00			80,99	81,75	82,51	83,27	
		Perkuatan kelembagaan bidang perumahan dan permukiman	Paket	1			1	1	1	1	
		Tersedianya database perumahan dan permukiman	Dokumen	1			1	1	1	1	
		Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan	%	0			10	20	30	40	

NO	URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					T	T	T	T	T	T	
		dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah									
	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Penurunan luasan kawasan kumuh	%	16,5			14,5	13,5	12,5	11,5	
		Meningkatnya kualitas PSU Permukiman	%	30			30,01	30,02	30,03	30,04	
	Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan	Terlaksananya operasional TPA	Unit				20	25	30	35	
		Jumlah infrastruktur TPA Sampah Regional yang dipelihara	Paket	1			1	1	1	1	
		Jumlah lokasi kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipantau	Unit	2			2	3	3	4	
	Pengelolaan Pertanahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah	Dokumen	0			1	1	1	1	

NO	URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					T	T	T	T	T	T	
		Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	%	79,00			80,50	82,50	83,50	85,00	
		Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanah	%	80,00			85,00	85,00	87,50	90,00	

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis ini adalah Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Lima Tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dan target – target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun kedepan.

Dokumen ini mencakup jangka waktu rentang tahun 2016 - 2021 sesuai dengan masa kerja Gubernur dan sesuai juga dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun dan pada saat masa transisi yaitu pada tahun 2017 Dokumen Renstra ini dapat dipergunakan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja 2017, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang termuat dalam RPJP-Daerah 2010-2025 dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM - Nasional maupun dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum.

Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, berkurangnya kawasan kumuh, berkurangnya rumah tidak layak huni, meningkatnya cakupan layanan air minum, tersedianya TPA Sampah Regional, keterpaduan antar daerah/wilayah perbatasan Provinsi, menumbuh kembangkan kegiatan pariwisata sebagai stimulan bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah

serta perluasan akses sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung daya saing Provinsi Sumatera Barat.

Selain hal tersebut di atas, dokumen ini juga menjadi acuan penanganan pasca gempa 2009 dalam kegiatan rehabilitasi rumah masyarakat serta rehabilitasi/ retrofit/ pembangunan kembali gedung perkantoran pemerintah.

Demikian penyusunan dokumen ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Formulir E-54
Evaluasi terhadap Hasil Renstra OPD Lingkup Provinsi
Renstra OPD: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi: Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan: [Tahun 2017]

Indikator dan Target Kinerja OPD Provinsi yang mengacu pada Sasaran RPJMD Provinsi:

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra OPD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										Unit Penanggung Jawab
						1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
	Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			40.295.000.000					11.514.357.238			13.708.357.790		15.449.000.000		36.682.000.000				9.441.354.485													Dinas PRKPP		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		0	731	1.965.000.000		0		418.075.216		498.508.216,00		958.644.436,00		1.078.000.000,00		146,25	391.530.061,00		498.508.216,00		958.644.436,00		1.078.000.000,00		0%	19,78%	22,84%	33,35%	38,69%		114,67%			
01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	60	15.000.000	0	0	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.000.000,00	12 Bulan	3.465.000	12 Bulan	5.000.000	0	0	12	2.926.800,00	3.000.000,00		3.465.000		5.000.000	0	0	19,51%	20,00%	23,10%	33,33%					
02		Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	Tersedianya Sopir Kantor	0	60	600.000.000	0	0	12 Bulan	107.200.612	12 Bulan	183.630.846,00	12 Bulan	215.424.461	12 Bulan	238.000.000	0	0	12	106.714.071,00	183.630.846,00		215.424.461		238.000.000	0	0	17,79%	30,61%	35,90%	39,67%					
03		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	0	60	155.000.000	0	0	12 Bulan	34.355.450	12 Bulan	34.355.450,00	12 Bulan	78.277.800	12 Bulan	87.000.000	0	0	12	34.354.775,00	34.355.450,00		78.277.800		87.000.000	0	0	22,16%	22,16%	50,50%	56,13%					
04		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan/foto copy yang diperlukan	0	60	125.000.000	0	0	12 Bulan	28.999.850	12 Bulan	28.999.850,00	12 Bulan	28.999.850	12 Bulan	31.000.000	0	0	12	28.982.800,00	28.999.850,00		28.999.850		31.000.000	0	0	23,19%	23,20%	23,20%	24,80%					
05		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	60	45.000.000	0	0	12 Bulan	9.000.000	12 Bulan	9.000.000,00	12 Bulan	9.000.000	12 Bulan	11.000.000	0	0	12	8.991.950,00	9.000.000,00		9.000.000		11.000.000	0	0	19,98%	20,00%	20,00%	24,44%					
06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	0	5040	45.000.000	0	0	48 minggu x 5 hari x 4 jenis koran + 48 (tabloid)+ 1008 kali	9.291.000	48 minggu x 5 hari x 4 jenis koran + 48 (tabloid)+ 1008 kali	9.291.000,00	48 minggu x 5 hari x 4 jenis koran + 48 (tabloid)+ 1008 kali	9.291.000	48 minggu x 5 hari x 4 jenis koran + 48 (tabloid)+ 1008 kali	11.000.000	0	0	1008	9.240.000,00	9.291.000,00		9.291.000		11.000.000	0	0	20,53%	20,65%	20,65%	24,44%					
07		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ke Dalam dan Luar Daerah	0	450	810.000.000	0	0	90 Kali	188.228.304	90 kali	192.231.070,00	90 kali	576.186.325	90 kali	650.000.000	0	0	90	178.019.665,00	192.231.070,00		576.186.325		650.000.000	0	0	21,98%	23,73%	71,13%	80,25%					
08		Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Terlaksananya Kegiatan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	0	60	170.000.000	0	0	12 Publikasi	38.000.000	12 Publikasi	38.000.000,00	12 Publikasi	38.000.000	12 Publikasi	45.000.000	0	0	12	22.300.000,00	38.000.000,00		38.000.000		45.000.000	0	0	13,12%	22,35%	22,35%	26,47%					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0	249	1.920.000.000		0		408.338.082		544.725.082,00		804.411.582,00		855.000.000,00		12,25	400.080.360,00		544.725.082,00		804.411.582,00		855.000.000,00		0%	21,05%	24,23%	40,02%	45,40%		130,69%			
09		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0	65	800.000.000	0	0	5 Unit	118.225.082	5 Unit	418.225.082,00	5 Unit	578.911.582	5 Unit	600.000.000	0	0	5	113.382.310,00	418.225.082,00		578.911.582		600.000.000	0	0	14,17%	52,28%	72,36%	75,00%					
10		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	0	60	475.000.000	0	0	12 Bulan	103.100.000	12 Bulan	119.700.000,00	12 Bulan	210.300.000	12 Bulan	235.000.000	0	0	12	101.407.750,00	119.700.000,00		210.300.000		235.000.000	0	0	21,35%	25,20%	44,27%	49,47%					
11		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	24	610.000.000	0	0	12 Bulan	180.213.000	12 Bulan	0	12 Bulan	-	12 Bulan	-	0	0	12	178.500.000,00	0,00		-	0	0	29,26%	0,00%	0,00%	0,00%							
12		Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan komputerisasi	0	100	35.000.000	0	0	20 Kali	6.800.000	20 Kali	6.800.000,00	20 Kali	15.200.000	20 Kali	20.000.000	0	0	20	6.790.300,00	6.800.000,00		15.200.000		20.000.000	0	0	19,40%	19,43%	43,43%	57,14%					
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		0	520	425.000.000		0		63.980.000		79.315.200,00		79.315.200,00		90.000.000,00		102	59.526.500,00		79.315.200,00		79.315.200,00		90.000.000,00		0	14,01%	18,66%	18,66%	21,18%		72,51%			
13		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian Karyawan PNS Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0	520	425.000.000	0	0	102 Orang	63.980.000	102 Orang	79.315.200,00	102 Orang	79.315.200	102 Orang	90.000.000	0	0	102	59.526.500,00	79.315.200,00		79.315.200		90.000.000	0	0	14,01%	18,66%	18,66%	21,18%					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0	40	350.000.000		0		66.088.000		66.088.000,00		66.088.000,00		75.000.000,00		4,00	52.543.800,00		66.088.000,00		66.088.000,00		75.000.000,00		0	15,01%	18,88%	18,88%	21,43%		74,21%			
14		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan	0	40	350.000.000	0	0	4 Orang Pelatihan Luar Daerah & 4 Orang Pelatihan Dalam Daerah	66.088.000	4 Orang Pelatihan Luar Daerah & 4 Orang Pelatihan Dalam Daerah	66.088.000,00	4 Orang Pelatihan Luar Daerah & 4 Orang Pelatihan Dalam Daerah	66.088.000	4 Orang Pelatihan Luar Daerah & 4 Orang Pelatihan Dalam Daerah	75.000.000	0	0	4	52.543.800,00	66.088.000,00		66.088.000		75.000.000	0	0	15,01%	18,88%	18,88%	21,43%					
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0	75	1.485.000.000		0		268.274.550		268.274.550,00		261.130.000,00		290.000.000,00		7,50	216.684.020,00		268.274.550,00		261.130.000,00		290.000.000,00		0	10,46%	17,54%	16,45%	18,46%		62,92%			
15		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD (LAKIP, LKPI dan LPD)	0	15	300.000.000	0	0	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	50.000.000,00	3 Laporan	43.630.000	3 Laporan	50.000.000	0	0	3	10.614.320,00	50.000.000,00		43.630.000		50.000.000	0	0	3,54%	16,67%	14,54%	16,67%					
16		Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya Kelancaran Penatausahaan Keuangan SKPD	0	60	1.185.000.000	0	0	12 Bulan	218.274.550	12 Bulan	218.274.550,00	12 Bulan	217.500.000	12 Bulan	240.000.000	0	0	12	206.069.700,00	218.274.550,00		217.500.000		240.000.000	0	0	17,39%	18,42%	18,35%	20,25%					
		Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset		0	296	1.425.000.000		0		271.088.952		271.088.952,00		241.139.152,00		270.000.000,00		21,33	211.307.879,00		271.088.952,00		241.139.152,00		270.000.000,00		0	14,99%	19,03%	16,95%	18,98%		69,96%			
17		Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0	200	500.000.000	0	0	40 Exp	94.179.950	40 Exp	94.179.950,00	40 Exp	79.243.250	40 Exp	90.000.000	0	0	40	46.069.370,00	94.179.950,00		79.243.250		90.000.000	0	0	9,21%	18,84%	15,85%	18,00%					
18		Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Program Tahunan SKPD secara Terpadu	0	48	490.000.000	0	0	12 Bulan	93.268.800	12 Bulan	93.268.800,00	12 Bulan	85.595.400	12 Bulan	95.000.000	0	0	12	85.882.235,00	93.268.800,00		85.595.400		95.000.000	0	0	17,53%	19,03%	17,47%	19,39%					
19		Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	Tersedianya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang SKPD, serta tunjuk aset yang telah dihibahkan ke Kabupaten/Kota	0	48	435.000.000	0	0	12 Bulan	83.640.202	12 Bulan	83.640.202,00	12 Bulan	76.300.502	12 Bulan	85.000.000	0	0	12	79.356.274,00	83.640.202,00		76.300.502		85.000.000	0	0	18,24%	19,23%	17,54%	19,54%					
		Program Pengembangan Perumahan		0	61	5.125.000.000		0		915.015.000		1.664.760.692,00		3.310.000.000,00		2.436.000.000,00		12,33	850.008.537,00		1.664.760.692,00		1.715.000.000,00		2.436.000.000,00		0	7,89%	22,34%	23,55%	38,67%		92,45%			
20		Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Sosialisasi Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	0	30	1.500.000.000	0	0	6 Kali Pertemuan	330.000.000	6 Kali Pertemuan	350.000.000,00	6 Kali Pertemuan	225.000.000	6 Kali Pertemuan	250.000.000	0	0	6	294.102.715,00	350.000.000,00		225.000.000		250.000.000	0	0	19,61%	23,33%	15,00%	16,67%					
21		Sosialisasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	0	19	825.000.000	0	0	19 Kab/Kota	200.000.000	19 Kab/Kota	69.859.700,00	19 Kab/Kota	70.000.000	19 Kab/Kota	333.000.000	0	0	19	184.233.950,00	69.859.700,00		70.000.000		333.000.000	0	0	22,33%	8,47%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5							
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
1	2	3	4	5	6		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan kepada Aparatur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	-			2 Kali Kegiatan		69.859.700,00		75.000.000		333.000.000	0	0	0	-	69.859.700,00		75.000.000		333.000.000	0	0	0,00%	14,62%	15,69%	69,69%		
		Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam	Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman terhadap Bencana Alam kepada Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan	0	0	-			1 Kali Kegiatan		175.041.292,00		195.000.000		215.000.000	0	0	0	-	175.041.292,00		195.000.000		215.000.000	0	0	0,00%	29,92%	33,33%	36,75%		
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota	0	0	-			19 Kab/Kota		200.000.000,00		200.000.000		250.000.000	0	0	0	-	200.000.000,00		200.000.000		250.000.000	0	0	0,00%	30,77%	30,77%	38,46%		
		Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	Terusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Provinsi Sumatera Barat	0	0	-			12 Bulan		150.000.000,00		200.000.000		225.000.000	0	0	0	-	150.000.000,00		200.000.000		225.000.000	0	0	0,00%	26,09%	34,78%	39,13%		
		Pendampingan Penyusunan Dokumen Penyediaan Perumahan Kabupaten/Kota											330.000.000		350.000.000							330.000.000		350.000.000								
		Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi MBR di Kawasan Kumuh											1.265.000.000		2.000.000.000							1.265.000.000		2.000.000.000								
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		0	65	25.000.000.000	0		5.024.575.200		4.874.386.039	-			5,67	3.316.216.742,00	4.874.386.039	-		0	6,51%	34,91%	0,00%	0,00%	41,42%							
REF		Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional	Meningkatkan pengelolaan TPA Sampah Regional	0	60	19.500.000.000	0	0	12 Bulan		3.600.000.000	12 Bulan	3.474.386.039	12 Bulan	-	12 Bulan	-	0	0	12	2.371.823.492,00	3.474.386.039,00	-		0	0	12,16%	17,82%	0,00%	0,00%	Pindah OPD	
REF		Peningkatan Pembangunan Infrastruktur TPA Sampah Regional	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur TPA Sampah Regional	0	4	5.500.000.000	0	0	4 Tahapan		1.224.575.200	4 Tahapan	1.200.000.000	4 Tahapan	-	4 Tahapan	-	0	0	4	762.939.050,00	1.200.000.000,00	-		0	0	13,87%	21,82%	0,00%	0,00%	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	
		Pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional	Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dilaporkan						12 Bulan		12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	-	12 Bulan	-	0	0	0	-	200.000.000,00		-		0	0	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
REF		Masterplan Persampahan (DDUB)	Tersediannya Buku Dokumen Lingkungan TPA Regional	0	0	-	0	0	1 Dokumen		598.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	0	0	0	-	0,00		-		0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
REF		Penyusunan Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL/UKL) TPA Sampah (DDUB)	Tersediannya Buku Dokumen Lingkungan TPA Regional	0	0	181.454.200	0	0	1 Dokumen		200.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	0	0	0	-	0,00		-		0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan		0	68		0		3.371.322.238		4.558.211.059		8.891.951.630		30.660.000.000		6,67	3.318.828.096,00	4.558.211.059		8.891.951.630		30.660.000.000	0	14,74%	22,14%	5,40%	36,29%	78,58%			
REF		Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat	0	60	52.850.000.000	0	0	12 Bulan		200.000.000	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	0	0	12	189.550.011,00	0,00		-		0	0	25,27%	0,00%	0,00%	0,00%	Program Pengembangan Perumahan
REF		Pembangunan PLP2K-BK	Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	0	4	750.000.000	0	0	4 Tahapan		2.523.923.400	4 Tahapan	-	4 Tahapan	-	4 Tahapan	-	0	0	4	2.488.064.985,00	0,00		-		0	0	98,58%	0,00%	0,00%	0,00%	Ganti Judul Kegiatan
REF		Stimulasi Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	0	4	44.800.000.000	0	0	4 Tahapan		647.398.838	4 Tahapan	-	4 Tahapan	-	4 Tahapan	-	0	0	4	641.213.100,00	0,00		-		0	0	8,78%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	0	0				0		4 Tahapan	584.262.030	4 Tahapan	1.200.000.000	4 Tahapan	1.800.000.000	0	0	0	-	584.262.030,00		1.200.000.000		1.800.000.000	0	0	0,00%	16,30%	33,48%	50,22%	
		Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi	Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	0	0				0		4 Tahapan	1.605.997.594	4 Tahapan	6.791.951.630	4 Tahapan	25.000.000.000	0	0	0	-	1.605.997.594,00		6.791.951.630		25.000.000.000	0	0	0,00%	3,58%	15,16%	55,80%	
		Updating dan Pengumpulan Data untuk Database Perumahan dan Permukiman	Terlaksananya Pengumpulan Data untuk Database Sektor Perumahan dan Permukiman Kab/Kota Se-Sumatera Barat										900.000.000		1.000.000.000							900.000.000		1.000.000.000								
		Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)	Terlaksananya pembangunan kawasan strategis dan khusus	0	0				0		4 Tahapan	1.477.263.005	4 Tahapan	-	4 Tahapan	1.750.000.000	0	0	0	-	1.477.263.005,00		-		1.750.000.000	0	0	0,00%	45,77%	0,00%	54,23%	
		Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus	Terlaksananya Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) kawasan Strategis dan Khusus	0	0				0		4 Tahapan	492.688.430	4 Tahapan	-	4 Tahapan	615.000.000	0	0	0	-	492.688.430,00		-		615.000.000	0	0	0,00%	44,48%	0,00%	55,52%	
		Penyusunan Ranperda Persampahan Provinsi Sumatera Barat	Dokumen Draft Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Persampahan	0	0				0		1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	250.000.000	0	0	0	-	200.000.000,00		-		250.000.000	0	0	0,00%	44,44%	0,00%	55,56%	
		Sosialisasi persampahan terhadap Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang telah diberikan sosialisasi persampahan	0	0				0		19 Kab/Kota	198.000.000	19 Kab/Kota	-	19 Kab/Kota	245.000.000	0	0	0	-	198.000.000,00		-		245.000.000	0	0	0,00%	44,70%	0,00%	55,30%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	15											
REF		Program Pengelolaan Pertanahan		0	185	2.600.000.000	0	0	708.000.000	883.000.000	836.320.000	928.000.000	18,50	624.628.490,00	883.000.000	836.320.000	928.000.000	0	5,01%	26,04%	24,47%	27,27%	82,78%									
		Penanganan Masalah Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Penanganan Masalah Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	0	125	1.950.000.000	0	0	25 Permasalahan	575.000.000	25 Permasalahan	0	25 Permasalahan	-	25 Permasalahan	0	0	25	497.623.170,00	0,00			0	0	25,52%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Monev Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Monev Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	0	60	650.000.000	0	0	12 Bulan	133.000.000	12 Bulan	0	12 Bulan	-	12 Bulan	0	0	12	127.005.320,00	0,00			0	0	19,54%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	0	0	-	0	0	1 Kali Kegiatan	-	1 Kali Kegiatan	83.000.000,00	1 Kali Kegiatan	83.000.000	1 Kali Kegiatan	95.000.000	0	0	0	-	83.000.000,00	83.000.000	95.000.000	0	0	0,00%	31,80%	31,80%	36,40%			
		Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	0	0	-	0	0	1 Kali Kegiatan	-	1 Kali Kegiatan	79.000.000,00	1 Kali Kegiatan	71.220.000	1 Kali Kegiatan	80.000.000	0	0	0	-	79.000.000,00	71.220.000	80.000.000	0	0	0,00%	34,32%	30,94%	34,75%			
		Bimtek Pengelolaan Pertanahan	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Pertanahan	0	0	-	0	0	1 Kali Kegiatan	-	1 Kali Kegiatan	103.000.000,00	1 Kali Kegiatan	103.000.000	1 Kali Kegiatan	115.000.000	0	0	0	-	103.000.000,00	103.000.000	115.000.000	0	0	0,00%	32,09%	32,09%	35,83%			
		Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan	Terlaksananya Sosialisasi dan koordinasi dalam Pelaksanaan Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan	0	0	-	0	0	3 Kali Kegiatan	-	3 Kali Kegiatan	235.000.000,00	3 Kali Kegiatan	235.000.000	3 Kali Kegiatan	260.000.000	0	0	0	-	235.000.000,00	235.000.000	260.000.000	0	0	0,00%	32,19%	32,19%	35,62%			
		Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	0	0	-	0	0	12 Bulan	-	12 Bulan	169.000.000,00	12 Bulan	153.440.000	12 Bulan	165.000.000	0	0	0	-	169.000.000,00	153.440.000	165.000.000	0	0	0,00%	34,67%	31,48%	33,85%			
		Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat	Terlaksananya Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	0	0	-	0	0	12 Bulan	-	12 Bulan	141.000.000,00	12 Bulan	125.440.000	12 Bulan	140.000.000	0	0	0	-	141.000.000,00	125.440.000	140.000.000	0	0	0,00%	34,69%	30,86%	34,45%			
		Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	0	0	-	0	0	1 Kali Kegiatan	-	1 Kali Kegiatan	73.000.000,00	1 Kali Kegiatan	65.220.000	1 Kali Kegiatan	73.000.000	0	0	0	-	73.000.000,00	65.220.000	73.000.000	0	0	0,00%	34,56%	30,88%	34,56%			
Rata-rata capaian kinerja (%)																8	12,94%	22,66%	19,77%	26,64%	82,02%											
Predikat kinerja																																
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																
Faktor penghambat:																																
Usulan tindak lanjut pada Renja OPD Provinsi berikutnya:																																
Usulan tindak lanjut pada Renstra OPD Provinsi berikutnya:																																

Padang, Maret 2018
KEPALA OPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

I. CHANDRA MUSTIKA
NIP. 19590815 198703 1 007

FORMULIR E.55
 Evaluasi Hasil terhadap Renja OPD Lingkup Provinsi
 Renja OPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
 Periode Pelaksanaan: (Tahun 2017)

Indikator dan target kinerja OPD Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi:

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD Provinsi) (2021)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun lalu (n-2) (2016)	Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2017 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab				
							I		II		III		IV			12		13 = 6 + 12			14 = 13/5 x 100%			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		93.145.000.000	-	11.514.357.238	5,00	634.063.668	4,50	833.955.718	6,10	1.997.070.798	18,05	5.976.264.301	33,65	9.441.354.485	33,65	9.441.354.485	12,05%	15,94%	Dinas PRKPP			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		731	1.965.000.000	0	10	418.075.216	34	53.429.393	25	77.460.538	46	81.027.217	41	179.612.913	146,25	391.530.061	146,25	391.530.061,00	20,00%	19,93%		
01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	60	15.000.000,00	0	0	12 Bulan	3.000.000	3	733.250	3	760.350	3	765.700	3	667.500	12	2.926.800	12,00	2.926.800,00	20,00%	19,51%	
02		Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	Tersedianya Sopir Kantor	60	600.000.000,00	0	0	12 Bulan	107.200.612	3	24.851.043	3	32.647.483	3	24.851.043	3	24.364.502	12	106.714.071	12,00	106.714.071,00	20,00%	17,79%	
03		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	60	155.000.000,00	0	0	12 Bulan	34.355.450	3	4.926.700	3	5.090.000	3	4.951.100	3	19.386.975	12	34.354.775	12,00	34.354.775,00	20,00%	22,16%	
04		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan/foto copy yang diperlukan	60	125.000.000,00	0	0	12 Bulan	28.999.850	3	6.295.400	3	6.792.950	3	6.571.400	3	9.323.050	12	28.982.800	12,00	28.982.800,00	20,00%	23,19%	
05		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	45.000.000,00	0	0	12 Bulan	9.000.000	0	-	6	4.474.250	3	2.272.600	3	2.245.100	12	8.991.950	12,00	8.991.950,00	20,00%	19,98%	
06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	5040	45.000.000,00	0	0	48 minggu x 5 hari x 4 jenis koran + 48 (tabloid)= 1008 kali	9.291.000	252	2.310.000	168	1.540.000	336	3.080.000	252	2.310.000	1008	9.240.000	1008,00	9.240.000,00	20,00%	20,53%	
07		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ke Dalam dan Luar Daerah	450	810.000.000,00	0	0	90 Kali	188.228.304	7	14.313.000	11	22.855.505	20	38.535.374	52	102.315.786	90	178.019.665	90,00	178.019.665,00	20,00%	21,98%	
08		Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Terlaksananya Kegiatan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	60	170.000.000,00	0	0	12 Publikasi	38.000.000	0	-	2	3.300.000	0	-	10	19.000.000	12	22.300.000	12,00	22.300.000,00	20,00%	13,12%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur		249	1.920.000.000	0	-	408.338.082	1,50	74.576.350	2,75	12.777.800	1,50	20.720.900	6,50	292.005.310	12,25	400.080.360	12,25	400.080.360,00	4,92%	20,84%		
09		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	65	800.000.000,00	0	0	5 Unit	118.225.082	2	44.979.000	0	-	0	-	3	68.403.310	5	113.382.310	5,00	113.382.310,00	7,69%	14,17%	
10		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	60	475.000.000,00	0	0	12 Bulan	103.100.000	4	29.597.350	1	9.383.200	2	19.415.200	5	43.012.000	12	101.407.750	12,00	101.407.750,00	20,00%	21,35%	
11		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	24	610.000.000,00	0	0	12 Bulan	180.213.000	0	-	0	-	0	-	12	178.500.000	12	178.500.000	12,00	178.500.000,00	50,00%	29,26%	
12		Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan jaringan	100	35.000.000,00	0	0	20 Kali	6.800.000	0	-	10	3.394.600	4	1.305.700	6	2.090.000	20	6.790.300	20,00	6.790.300,00	20,00%	19,40%	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		520	425.000.000	0	-	63.580.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	102,00	59.526.500	102,00	59.526.500	102,00	59.526.500,00	19,62%	14,01%		
13		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian Karyawan PNS Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	520	425.000.000,00	0	0	102 Orang	63.580.000	0	-	0	-	0	-	102	59.526.500	102	59.526.500	102,00	59.526.500,00	19,62%	14,01%	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		40	350.000.000	0	-	66.088.000	1,00	5.630.000	0,00	-	0,00	-	3,00	46.913.800	4,00	52.543.800	4,00	52.543.800,00	10,00%	15,01%		
14		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang - undangan	40	350.000.000,00	0	0	4 Orang Pelatihan Luar Daerah & 4 Orang Pelatihan	66.088.000	1	5.630.000	0	-	0	-	3	46.913.800	4	52.543.800	4,00	52.543.800,00	10,00%	15,01%	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		75	1.485.000.000	0	-	268.274.550	2,50	51.465.360	2,00	60.355.960	1,50	52.373.500	1,50	52.489.200	7,50	216.684.020	7,50	216.684.020,00	10,00%	14,59%		
15		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD (LAKIP, LKPI dan LPPD)	15	300.000.000,00	0	0	3 Laporan	50.000.000	2	4.824.860	1	4.503.460	0	1.286.000	0	-	3	10.614.320	3,00	10.614.320,00	20,00%	3,54%	
16		Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya Kelancaran Penatausahaan Keuangan SKPD	60	1.185.000.000,00	0	0	12 Bulan	218.274.550	3	46.640.500	3	55.852.500	3	51.087.500	3	52.489.200	12	206.069.700	12,00	206.069.700,00	20,00%	17,39%	
		Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset		296	1.425.000.000	0	-	271.088.952	4,00	24.071.750	7,00	43.743.150	3,33	43.444.374	7,00	100.048.605	21,33	211.307.879	21,33	211.307.879,00	7,21%	14,83%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD Provinsi) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun lalu (n-2) (2016)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2017 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
17		Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	200	500.000.000,00	0	0	40 Exp	94.179.950	6	5.501.000	15	19.011.840	4	3.227.000	15	18.329.530	40	46.069.370	40,00	46.069.370,00	20,00%	9,21%	
18		Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Kinerja dan Pelaporan	48	490.000.000,00	0	0	12 Bulan	93.268.800	3	16.252.750	3	15.583.310	3	18.325.750	3	35.720.425	12	85.882.235	12,00	85.882.235,00	25,00%	17,53%	
19		Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	Tersedianya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang SKPD, serta tunjuk aset yang telah dihibahkan ke Kabupaten/Kota	48	435.000.000,00	0	0	12 Bulan	83.640.202	3	2.318.000	3	9.148.000	3	21.891.624	3	45.998.650	12	79.356.274	12,00	79.356.274,00	25,00%	18,24%	
		Program Pengembangan Perumahan		61	5.125.000.000	0	-		915.015.000	1,67	42.442.250	2,33	153.703.036	1,33	161.089.989	7,00	492.773.262	12,33	850.008.537	12,33	850.008.537,00	20,22%	16,59%	
20		Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Sosialisasi Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	30	1.500.000.000	0	0	6 Kali Pertemuan	330.000.000	1	19.889.450	1	63.226.936	1	51.790.767	3	159.195.562	6	294.102.715	6,00	294.102.715,00	20,00%	19,61%	
21		Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	19	825.000.000,00	0	0	19 Kab/Kota	200.000.000	3	9.089.400	5	77.838.950	1	3.081.600	10	94.224.000	19	184.233.950	19,00	184.233.950,00	100,00%	22,33%	
22		Updating dan Pengumpulan Data untuk Database Perumahan dan Permukiman	Terupdatenya Database Sektor Perumahan dan Permukiman Kab/Kota Se-Sumatera Barat	12	2.800.000.000,00	0	0	12 Lokasi	385.015.000	1	13.463.400	1	12.637.150	2	106.217.622	8	239.353.700	12	371.671.872	12,00	371.671.872,00	100,00%	13,27%	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan Kepada Aparatur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam	Terlaksananya Sosialisasi dan Wokshop Pembangunan Rumah yang Aman terhadap Bencana Alam kepada Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Provinsi Sumatera Barat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		65	25.000.000.000	0	-		5.024.575.200	1,33	279.525.815	1,33	375.034.334	1,33	568.679.548	1,67	2.092.977.045	5,67	3.316.216.742	5,67	3.316.216.742,00	8,72%	13,26%	
23		Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional	Meningkatkan pengelolaan TPA Sampah Regional	60	19.500.000.000,00	0	0	12 Bulan	3.600.000.000	3	272.774.265	3	371.185.334	3	558.959.548	3	1.168.904.345	12	2.371.823.492	12,00	2.371.823.492,00	20,00%	12,16%	
24		Peningkatan Pembangunan Insrastruktur TPA Sampah Regional	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur TPA Sampah Regional	4	5.500.000.000,00	0	0	4 Tahapan	1.224.575.200	1	6.751.550	1	3.849.000	1	9.720.000	1	742.618.500	4	762.939.050	4,00	762.939.050,00	100,00%	13,87%	
25		Masterplan Persampahan (DDUB)	Tersedianya Buku Dokumen Lingkungan TPA Regional Sijunjung	0	-	0	0	1 Dokumen	598.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00%	0,00%	
26		Penyusunan Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL/UPL) TPA Sampah (DDUB)	Tersedianya Buku Dokumen Lingkungan TPA Regional Sijunjung	0	181.454.200,00	0	0	1 Dokumen	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Pengelolaan Persampahan TPA Regional	Tersedianya Naskah Akademis dan Ranperda Pengelolaan Persampahan TPA Regional	1	0	0	0	1 Naskah	200.000.000	0	-	0	-	0	-	1	181.454.200	1	181.454.200	1,00	181.454.200,00	100,00%	100,00%	
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan		68	52.850.000.000	0	-		3.371.322.238	1,67	40.927.350	1,67	53.704.150	1,67	879.150.870	1,67	2.345.045.726	6,67	3.318.828.096	6,67	3.318.828.096,00	9,80%	6,28%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD Provinsi) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun lalu (n-2) (2016)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2017 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
27		Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat	60	750.000.000,00	0	0	12 Bulan	200.000.000	3	27.138.350	3	29.723.250	3	29.607.585	3	103.080.826	12	189.550.011	12,00	189.550.011,00	20,00%	25,27%	
28		Pembangunan PLP2K-BK	Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	4	44.800.000.000,00	0	0	4 Tahapan	2.523.923.400	1	9.598.500	1	7.845.400	1	709.039.185	1	1.761.581.900	4	2.488.064.985	4,00	2.488.064.985,00	100,00%	5,55%	
29		Stimulasi Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	4	7.300.000.000,00	0	0	4 Tahapan	647.398.838	1	4.190.500	1	16.135.500	1	140.504.100	1	480.383.000	4	641.213.100	4,00	641.213.100,00	100,00%	8,78%	
		Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi	Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)	Terlaksananya pembangunan kawasan strategis dan khusus			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus	Terlaksananya Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Kawasan Strategis dan Khusus			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Penyusunan Ranperda Persampahan Provinsi Sumatera Barat	Dokumen Draft Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Persampahan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Sosialisasi persampahan terhadap Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang telah diberikan sosialisasi persampahan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pengelolaan Pertanahan		185	2.600.000.000	0	-		708.000.000	2,50	61.995.400	3,00	57.176.750	4,00	190.584.400	9,00	314.871.940	18,50	624.628.490	18,50	624.628.490,00	10,00%	24,02%	
30		Penanganan Masalah Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Penanganan Masalah Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	125	1.950.000.000,00	0	0	25 Permasalahan	575.000.000	2	42.953.200	3	39.200.150	5	116.944.500	15	298.525.320	25	497.623.170	25,00	497.623.170,00	20,00%	25,52%	
		Monev Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Monev Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	60	650.000.000,00	0	0	12 Bulan	133.000.000	3	19.042.200	3	17.976.600	3	73.639.900	3	16.346.620	12	127.005.320	12,00	127.005.320,00	20,00%	19,54%	
		Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Bimtek Pengelolaan Pertanahan	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Pertanahan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD Provinsi) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun lalu (n-2) (2016)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2017 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										5		6		7		8		9		10		11		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan	Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi dalam Pelaksanaan Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
					0		0		0		0		0		0		0		0		0			
					0		0		0		0		0		0		0		0		0			
		Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Pembinaaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum				0		0		0		0		0		0		0		0			
		Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat	Terlaksananya Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat				0		0		0		0		0		0		0		0			
31		Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi				0		0		0		0		0		0		0		0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			15,94%					
Predikat kinerja																								
Faktor pendukung keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD Provinsi berikutnya*):																								

Disusun
Padang, Maret 2018
KEPALA OPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Dievaluasi
Padang, Maret 2018
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. CHANDRA MUSTIKA
NIP. 19590815 198703 1 007

(
NIP.

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	-	-	-	-	-	
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-	-	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	
1.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	-	-	-	-	-	
1.1.2.02.03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah			-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	-	
2	BELANJA	21.351.738.167,11	15.120.445.813,50	70,82	6.231.292.353,61	29,18	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.737.057.753,11	6.175.583.222,00	63,42	3.561.474.531,11	36,58	
2.1.1	Belanja Pegawai	9.737.057.753,11	6.175.583.222,00	63,42	3.561.474.531,11	36,58	
2.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.844.795.753,11	4.459.794.056,00	56,85	3.385.001.697,11	43,15	
2.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.892.262.000,00	1.715.789.166,00	90,67	176.472.834,00	9,33	
2.2	BELANJA LANGSUNG	11.614.680.414,00	8.944.862.591,50	77,01	2.669.817.822,50	22,99	
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	-	-	-	-	-	
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.065.513.538,00	6.514.818.091,50	71,86	2.550.695.446,50	28,14	
5.2.3	BELANJA MODAL	2.549.166.876,00	2.430.044.500,00	95,33	119.122.376,00	4,67	
	Tanah	-	-	-	-	-	
	Peralatan dan Mesin	1.294.743.876,00	1.180.272.500,00	-	114.471.376,00	-	
	Gedung dan Bangunan	1.254.423.000,00	1.249.772.000,00	-	4.651.000,00	-	
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	21.351.738.167,11	15.120.445.813,50	70,82	6.231.292.353,61	29,18	
	SURPLUS/DEFISIT	(21.351.738.167,11)	(15.120.445.813,50)	70,82	(6.231.292.353,61)	29,18	

II	BELANJA DAERAH	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KETERANGAN
1	SP2D UP	790.000.000,00	-	790.000.000,00	
2	SP2D GU	2.191.479.109,00	628.853.353,00	2.820.332.462,00	
3	SP2D TU	-	-	-	
4	SP2D LS-GAJI	5.735.631.061,00	439.952.161,00	6.175.583.222,00	
5	SP2D LS-BARANG & JASA	3.018.083.432,00	2.396.617.177,50	5.417.670.259,50	
	JUMLAH SP2D	11.735.193.602,00	3.465.422.691,50	15.203.585.943,50	

III	Contra Post (Pengembalian Belanja)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KETERANGAN
	Contra Post (Pengembalian Belanja)	(118.900,00)	(2.850.750,00)	(2.969.650,00)	
	Sisa UYHD	-	80.170.480,00	80.170.480,00	

IV	KAS	POSISI PER AKHIR BULAN	KETERANGAN
1	Kas Pada Bendahara Penerimaan	-	
2	Kas Pada Bendahara Pengeluaran	-	

Padang, 31 Desember 2018
Kepala Dinas,

Ir. CHANDRA MUSTIKA
NIP. 19590815 198703 1 007

REKAP ASET



BUKU ASET LAINYA (NILAI BUKU)

SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROVINSI : SUMATERA BARAT

NO. KODE LOKASI : 11.xx.15.00.101041.00000.00000.xxxx

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/Konstruksi (P,S,D)	Satuan	Keadaan Barang (B,KB)	JUMLAH dan HARGA				
No. Urut	Kode barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat. No.pabrik/No.chasis/No. Mesin							Barang	Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Beban Penyusutan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ASET LAINYA													593.105.800	593.105.800	0	799.700
ASET TIDAK BERWUJUD													535.093.500	535.093.500	0	0
1	07.01.00.00.00	0001	Revisi RP4D Sumatera Barat					2013				1	300.866.500	300.866.500	0	0
2	07.01.00.00.00	0001	Perencanaan PLP2K-BK Pasbar					2013				1	118.345.000	118.345.000	0	0
3	07.01.00.00.00	0001	Peny Database Perumahan Sumbar					2013				1	115.882.000	115.882.000	0	0
ASET TIDAK BERMANFAAT													58.012.300	58.012.300	0	799.700
4	07.03.00.00.00	0001	Printer Laserjet	HP Laserjet Pro M1536dnf MFP	-/-/-	Fiber	APBD	2012	A4	Unit	-	2	12.815.000	12.815.000	0	0
5	07.03.00.00.00	0001	Printer Inkjet A3	Epson Stylus	-/-/-	Fiber	APBD	2012	A3	Unit	-	4	21.560.000	21.560.000	0	0
6	07.03.00.00.00	0001	printer	Hp	-/-/-	Fiber	APBD	2012	-	-	-	1	2.500.000	2.500.000	0	0
7	07.03.00.00.00	0001	printer	-	-/-/-	Fiber	APBD	2012	-	-	-	1	2.500.000	2.500.000	0	0
8	07.03.00.00.00	0001	Alat Penyemprot Hama TPA Sampah	PANDA 16 KNAPSACK SPRAYER	-/-/-	Besi	APBD	2012	-	Unit	-	2	998.800	998.800	0	0
9	07.03.00.00.00	0001	Alat Pendingin / AC	LG	-/-/-	Fiber	APBD	2012	1 PK	Unit	-	4	13.640.000	13.640.000	0	0
10	07.03.00.00.00	0001	Finger Print TPA Sampah Regional Payakumbuh	Solution X302	-/-/-	Fiber	APBD	2014	-	Unit	-	1	3.998.500	3.998.500	0	799.700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													593.105.800	593.105.800	0	799.700

MENGETAHUI
KEPALA DINAS

(Ir. CHANDRA MUSTIKA)
NIP. 19590815 198703 1 007

31 Desember 2018
PENGURUS BARANG

(IRWANTO)
NIP. 19810112 200901 1 010

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS (NILAI BUKU)

No Urut	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN (Rp.)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp.)	NILAI BUKU (Rp.)	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2018 (Rp.)
				PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01		GOLONGAN TANAH			2.291.371.200,00	0,00	2.291.371.200,00	0,00
		01	TANAH	1	1.618	2.291.371.200,00	0,00	2.291.371.200,00	0,00
2	02		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			5.261.527.000,00	3.870.397.787,50	1.391.129.212,50	799.754.437,50
		03	ALAT-ALAT ANGKUTAN	-	7	2.132.881.500,00	1.308.921.437,50	823.960.062,50	217.660.187,50
		04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	2	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
		06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	-	365	1.709.823.500,00	1.152.114.350,00	557.709.150,00	301.629.850,00
		07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	-	1	11.825.000,00	2.365.000,00	9.460.000,00	2.365.000,00
		09	ALAT LABORATORIUM	-	1	1.390.497.000,00	1.390.497.000,00	0,00	278.099.400,00
3	03		GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN			8.226.760.000,00	1.978.552.080,00	6.248.207.920,00	164.535.200,00
		11	BANGUNAN GEDUNG	2	1.573	8.226.760.000,00	1.978.552.080,00	6.248.207.920,00	164.535.200,00
4	04		GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARIN			2.488.064.985,00	497.612.997,00	1.990.451.988,00	248.806.498,50
		13	JALAN DAN JEMBATAN	-	0	2.488.064.985,00	497.612.997,00	1.990.451.988,00	248.806.498,50
TOTAL HARGA						18.267.723.185,00	6.346.562.864,50	11.921.160.320,50	1.213.096.136,00
DIBULATKAN						18.267.723.185	6.346.562.865	11.921.160.321	1.213.096.136

Terbilang : Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah

MENGETAHUI
KEPALA DINAS

(Ir. CHANDRA MUSTIKA)
NIP. 19590815 198703 1 007

31 Desember 2018
PENGURUS BARANG

(IRWANTO)
NIP. 19810112 200901 1 010

REKAPITULASI BUKU ASET LAINYA (PENYUSUTAN)

No Urut	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN (Rp.)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp.)	NILAI BUKU (Rp.)	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2018
				PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07		ASET LAINYA			593.105.800,00	593.105.800,00	0,00	799.700,00
		01	ASET TIDAK BERWUJUD	-	3	535.093.500,00	535.093.500,00	0,00	0,00
		03	ASET TIDAK BERMANFAAT	-	15	58.012.300,00	58.012.300,00	0,00	799.700,00
TOTAL HARGA						593.105.800,00	593.105.800,00	0,00	799.700,00
DIBULATKAN						593.105.800	593.105.800	0	799.700

Terbilang : Rupiah

MENGETAHUI
KEPALA DINAS

31 Desember 2018
PENGURUS BARANG

(Ir. CHANDRA MUSTIKA)
NIP. 19590815 198703 1 007

(IRWANTO)
NIP. 19810112 200901 1 010

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur (SOP)

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

1. SOP KERJASAMA / FLPP
2. SOP PELAKSANAAN BIMTEK/ WORKSHOP DAN SERTIFIKASI
3. SOP PERENCANAAN PROGRAM DAN USULAN KEGIATAN
4. SOP PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PERUMAHAN
5. SOP USULAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
6. SOP UPDATING DATA PERUMAHAN
7. SOP KOORDINASI USULAN KABUPATEN KOTA TENTANG USULAN PERUMAN
8. SOP PEMBINAAN DAN PELATIHAN
9. SOP PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
10. SOP PENYUSUNAN TOR / KERANGKA ACUAN KERJA
11. SOP PENYELENGGARAAN PERUMAHAN (PEMBANGUNAN BARU, REHABILITASI DAN PEMBIAYAAN)
12. SOP USULAN PENYEDIAAN PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN KOTA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bidang Perumahan Rakyat
Seksi Penyediaan Perumahan

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan oleh :

KEPALA DINAS

I. CHANDRA MUSTIKA

NIP. 19590815 198703 1 007

Nama SOP :

Usulan Kabupaten Kota Tentang usulan penyediaan Perumahan Rakyat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/Pr/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Data Dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Pr/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/Pr/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/Pr/M/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Pr/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahterabagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan Minimal S1
2. Mengerti dengan tata cara Prosedur dan kelengkapan Usulan Penyediaan Perumahan
3. Memahami peraturan penilaian dan persetujuan Usulan Penyediaan Perumahan
4. Menguasai dan dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan

1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peralatan/perlengkapan

1. Alat tulis kantor, komputer, printer
2. Peraturan tentang penilaian Kelengkapan Us
- 3.
- 4.












Peringatan

1. Keterlambatan waktu pelaksanaan tugas
2. Kurangnya peralatan dan tenaga teknis yang dibutuhkan

Pencatatan dan pendataan

Manual dan elektronik

PROSEDUR


No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Staf	Kasi	Kabid Perumahan	Bidang Lain	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima disposisi dari Kadis PKPP dan meneruskan surat usulan perumahan rakyat dari Kabupaten Kota ke Kabid Perumahan						Surat permohonan dan Kelengkapan persyaratannya	15 Menit	Surat permohonan dan Kelengkapan persyaratannya	
2	Menerima disposisi dari Kadis PKPP dan meneruskan surat ke Kasi Penyediaan Perumahan.						- Surat Usulan yang dilengkapi dengan lembar disposisi Kadis, Kabid dan Kasi. - Peraturan terkait	15 Menit	Surat permohonan dan Kelengkapan persyaratannya dan Notulen Rapat, Nota Dinas	
3	Menindaklanjuti dan Penelaahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku						Surat permohonan dan Kelengkapan persyaratannya dan Notulen Rapat, Nota Dinas	60 menit	Surat arahan perbaikan/penolakan (apabila kurang). Dan Notulen Rapat, Nota Dinas	
4	Penilaian kelengkapan dan peninjauan lapangan (apabila dipertukan) dan pelaksanaan koordinasi						Surat arahan perbaikan/penolakan (apabila kurang).	1 h in	Konsep Telaahan Staff	
Persetujuan Usulan oleh Kadis PKPP							Konsep Telaahan Staff dan Usulan yang telah diperiksa	60 Menit	Usulan yang telah diperiksa dan disetujui	
5	Meneruskan menjadi usulan program Dinas PKPP						Konsep Telaahan Staff	60 menit	Surat Keluar	
6	Rekapitulasi Usulan Program Dinas PKPP							30 menit		
								1 hari 4 Jam		



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bidang Perumahan Rakyat

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	<p>KEPALA DINAS</p>  <p>Ir. CHANDRA MUSTIKA NIP. 19590815 198703 1 007</p>
Nama SOP	:	Penyelenggaraan Perumahan (Pembangunan Baru, rehabilitasi)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/Prt/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Data Dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/Prt/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/Prt/M/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Prt/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahterabagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan Minimal S1
2. Mengerti dengan tata cara Prosedur dan kelengkapan Usulan Penyediaan Perumahan
3. Memahami peraturan penilaian dan persetujuan Usulan Penyediaan Perumahan
4. Menguasai dan dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan

1. SOP Surat Keluar

Peralatan/perlengkapan

1. Alat tulis kantor, komputer, printer
2. Peraturan tentang penilaian Kelengkapan Usi
- 3.
- 4.




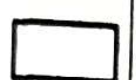



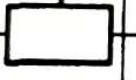




Peringatan

1. Keterlambatan waktu pelaksanaan tugas
2. Kurangnya peralatan dan tenaga teknis yang dibutuhkan

Pencatatan dan pendataan

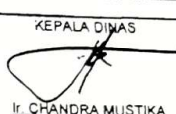
Manual dan elektronik

PROSEDUR

NO.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Staf	Kasi	Kabid	Kadis	Bid.Lain	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat permohonan/ proposal Fasilitas Instansi/ Kelompok Masyarakat/ swasta						Surat Permohonan/proposal dok. Pendukung	10 menit	Surat Permohonan/proposal dok. Pendukung diagendakan	
2	Menelaah Surat Permohonan/Proposal serta kelengkapan Data yang telah diberikan dan diajukan kepada Kepala Bidang	tidak					Surat Permohonan / proposal dok. Pendukung, checklist kelengkapan, informasi lainnya	15 Menit	Informasi hasil telaahan	
3	Menerima Surat Permohonan dan Menindaklanjuti Proposal beserta kelengkapan bersama Kepala Seksi dan Staf yang seterusnya di ajukan kepada kepala dinas				ya		Informasi hasil telaahan untuk di rapatkan serta diputuskan layak atau tidak	2 Jam	Surat hasil Berita acara yang telah di	
4	Mempelajari surat permohonan dan Kelengkapannya beserta hasil telaahan Kabid yang telah dirapatkan menugaskan untuk dapat ditindaklanjuti secepatnya.							30 Menit		
5	Menerima Persetujuan untuk pelaksanaan Jika Dana / Anggaran tersedia dan Jika Tidak tersedia dimasukkan dalam anggaran tahun Berikutnya.						Persetujuan Kabid	30 menit	Disposisi Kepala Seksi	
6	Penjadwalan dan Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan						Disposisi Kepala Seksi	Tergantung Pelaksanaan	Laporan Pelaksanaan fasilitas	
								3 Jam 25 Menit		



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Bidang Perumahan Rakyat

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Ir. CHANDRA MUSTIKA NIP. 19590815 198703 1 007
Nama SOP	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/Pr/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Data Dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Pr/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/Pr/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/Pr/M/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Pr/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan Minimal S1
2. Mengerti dengan tata cara Prosedur dan kelengkapan Usulan Penyediaan Perumahan
3. Memahami peraturan penilaian dan persetujuan Usulan Penyediaan Perumahan
4. Menguasai dan dapat mengoperasikan Komputer

Keterangan

1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peralatan/perlengkapan

1. Alat tulis kantor, komputer, printer
2. Peraturan tentang penilaian Kelengkapan Usul
- 3.
- 4.

Peringatan

1. Keterlambatan waktu pelaksanaan tugas
2. Kurangnya peralatan dan tenaga teknis yang dibutuhkan

Pencatatan dan pendataan

Manual dan elektronik


prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Staf	Kasi	Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun TOR dan SK Kegiatan					- DPA Dinas PKPP Prov. Sumbar	3 Jam	- Draft TOR dan SK Kegiatan	
2	Memeriksa TOR dan SK Kegiatan					- Draft TOR dan SK Kegiatan	20 Menit	- Draft TOR dan SK Kegiatan yang telah diperiksa dan di paraf	
3	Mengajukan TOR dan SK Kegiatan untuk ditandatangani					- Draf TOR dan SK Kegiatan yang telah diparaf Kasi	30 menit	- Draft TOR dan SK Kegiatan	
4	Mengkoordinasikan TOR dan SK bersama Kasi dan PPTK					- Draft TOR dan SK Kegiatan	1 Jam	- Draft TOR dan SK Kegiatan untuk diperbaiki	
	Penanda Tanganan TOR dan HPS dan kelengkapan pelaksanaan kegiatan					- Draft TOR dan SK Kegiatan yang telah diparaf oleh Kasi	10 Menit	- Draft panduan/petunjuk pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui	
	Mengajukan TOR dan HPS bersama kelengkapannya yang telah disetujui kepada Dinas PKPP untuk dilakukan proses lelang					- TOR dan HPS bersama kelengkapannya yang telah disetujui	Proses Lelang/ Persiapan Pekerjaan	- Kontrak/ SK Pelaksana Kegiatan	
	Melaksanakan kegiatan					- Kontrak/ SK Pelaksana Kegiatan	Proses Pelaksanaan	- Laporan Hasil Pelaksanaan	
	Laporan Hasil Lelang dan Pelaporan pelaksanaan Kegiatan					- Kontrak/ SK Pelaksana Kegiatan	Proses Pelaksanaan	- Laporan Hasil Pelaksanaan	
							5 Jam		



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bidang Perumahan Rakyat
Seksi Penyediaan Perumahan

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS  Ir. CHANDRA MUSTIKA NIP. 19590815 198703 1 007
Nama SOP	:	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Perumahan

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/Pr/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Data Dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Pr/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Tempat Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/Pr/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/Pr/M/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Pr/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahterabagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kualifikasi pelaksana
1. Pendidikan Minimal S1
2. Mengerti dengan tata cara Prosedur dan kelengkapan Usulan Penyediaan Perumahan
3. Memahami peraturan penilaian dan persetujuan Usulan Penyediaan Perumahan
4. Menguasai dan dapat mengoperasikan Komputer

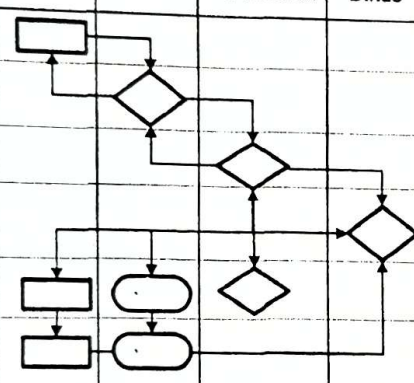
Alat/Bahan
1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peralatan/perlengkapan
1. Alat tulis kantor, komputer, printer
2. Peraturan tentang penilaian Kelengkapan Usul
3.
4.

Pengamatan
1. Keterlambatan waktu pelaksanaan tugas
2. Kurangnya peralatan dan tenaga teknis yang dibutuhkan

Pencatatan dan pendataan
Manual dan elektronik

PROSEDUR


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Staf	Kasie pp	Kabid Perumahan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengetik SPT Monitoring					Disposisi kepala Seksi untuk dibuatkan SPT	20 Menit	Ketikan SPT	Monitoring
2	Memeriksa dan memaraf konsep SPT					Ketikan SPT	5 Menit	Draf SPT diparaf oleh Kepala Seksi	
3	Mengoreksi dan memaraf konsep SPT					Draf SPT diparaf oleh Kepala Seksi	5 Menit	Draf SPT diparaf oleh Kepala Bidang	
4	Menyetujui dan menandatangani SPT					Draf SPT diparaf oleh Kepala Bidang	5 Menit	SPT ditandatangani oleh Kepala Dinas	
5	Menerima dan menyerahkan SPT untuk dilaksanakan					SPT Monitoring	5 Menit	SPT diterima	
6	Membuat Laporan Perjalanan Sesuai SPT					SPT Monitoring dan Laporan Perjalanan Dinas		Laporan Perjalanan Dinas	
							30 Menit		



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bidang Perumahan Rakyat

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	<div style="text-align: center;">KEPALA DINAS  I. CHANDRA MUSTIKA NIP. 19590815 198703 1 007</div>
Nama SOP	:	Pembinaan dan Pelatihan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/Pr/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Data Dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Pr/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/Pr/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/Pr/M/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Pr/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahterabagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan Minimal S1
2. Mengerti dengan tata cara Prosedur dan kelengkapan Usulan Penyediaan Perumahan
3. Memahami peraturan penilaian dan persetujuan Usulan Penyediaan Perumahan
4. Menguasai dan dapat mengoperasikan Komputer

Keterkaitan

1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peralatan/perlengkapan

1. Alat tulis kantor, komputer, printer
2. Peraturan tentang penilaian Kelengkapan Usul
- 3.
- 4.

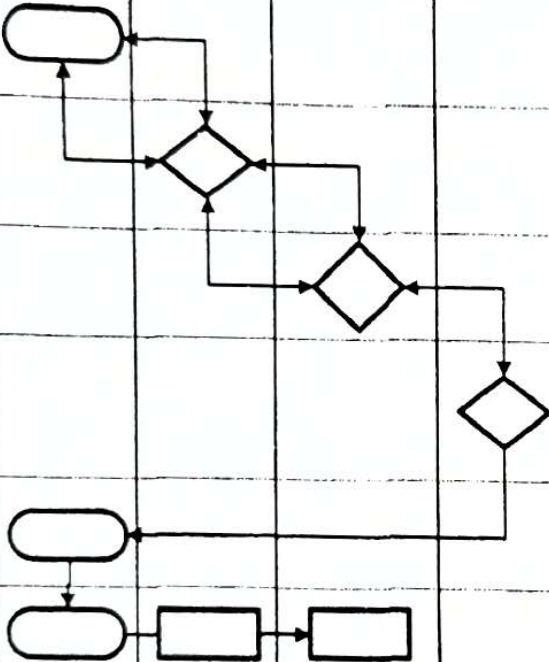
Peringatan

1. Keterlambatan waktu pelaksanaan tugas
2. Kurangnya peralatan dan tenaga teknis yang dibutuhkan

Pencatatan dan pendataan

Manual dan elektronik

PROSEDUR


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Staf	Kasie PP	Kabid Perumahan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat Surat Undangan, Nota Dinas dan Telaahan Staff					Draft Surat Undangan, Nota Dinas, Telaahan Staff	30 Menit	Draft Surat Undangan, Nota Dinas, Telaahan Staff	Pembinaan Penyediaan Perumahan
2	Memeriksa dan Mengajukan Surat Undangan, Nota Dinas dan Telaahan Staff					Draft Surat Undangan, Nota Dinas, Telaahan Staff	20 Menit	Draft Surat Undangan, Nota Dinas, Telaahan Staff	
3	Memeriksa, Mengajukan, dan Paraf Surat Undangan, Nota Dinas dan Telaahan Staff					Draft Surat Undangan, Nota Dinas, Telaahan Staff	20 Menit	Draft Surat Undangan, Nota Dinas, Telaahan Staff yang telah di paraf Kasi	
4	Memeriksa, Menyetujui dan Menandatangani Surat Undangan, Nota Dinas dan Telaahan Staff					Draft Surat Undangan, Nota Dinas, Telaahan Staff yang telah di paraf Kabid	30 Menit	Surat Undangan	
5	Mengirim Undangan					Surat Undangan	20 Menit	Tanda Terima Surat Undangan	
6	Pelaksanaan dan Pelaporan					Laporan Pelaksanaan	Menyesuaikan	Laporan Pelaksanaan	
							2 Jam		



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT










DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bidang Perumahan Rakyat

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS  Ir. CHANDRA MUSTIKA NIP. 19590815 198703 1 007
Nama SOP	:	Koordinasi Usulan Kabupaten Kota Tentang usulan penyediaan Perumahan Rakyat

Dasar Hukum <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/Prt/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Data Dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/Prt/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/Prt/M/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Prt/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahterabagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Kualifikasi pelaksana <ul style="list-style-type: none">1. Pendidikan Minimal S12. Mengerti dengan tata cara Prosedur dan kelengkapan Usulan Penyediaan Perumahan3. Memahami peraturan penilaian dan persetujuan Usulan Penyediaan Perumahan4. Menguasai dan dapat mengoperasikan Komputer
Keterkaitan <ul style="list-style-type: none">1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar	Peralatan/pertengkapan <ul style="list-style-type: none">1. Alat tulis kantor, komputer, printer2. Peraturan tentang penilaian Kelengkapan Us3.4.
Peringatan <ul style="list-style-type: none">1. Keterlambatan waktu pelaksanaan tugas2. Kurangnya peralatan dan tenaga teknis yang dibutuhkan	Pencatatan dan pendataan <ul style="list-style-type: none">Manual dan elektronik

PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket	
		Staf	Kasie PP	Kabid Perumahan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengetik SPT Pelaksanaan Koordinasi					Disposisi kepala Seksi untuk dibuatkan SPT	15 menit	Ketikan SPT	Koordinasi
2	Memeriksa dan memaraf konsep SPT					Ketikan SPT	10 Mneit	Draf SPT diparaf oleh Kepala Seksi	
3	Mengoreksi dan memaraf konsep SPT					Draf SPT diparaf oleh Kepala Seksi	10 Menit	Draf SPT diparaf oleh Kepala Bidang	
4	Menyetujui dan menandatangani SPT					Draf SPT diparaf oleh Kepala Bidang	10 Menit	SPT ditandatangani oleh Kepala Dinas	
5	Menerima dan menyerahkan SPT untuk dilaksanakan					SPT Monitoring	5 Menit	SPT diterima	
6	Membuat Laporan Perjalanan Sesuai SPT					SPT Monitoring dan Laporan Perjalanan Dinas	15 Menit	Laporan Perjalanan Dinas	
							1 Jam 5 Menit		



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT




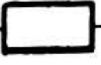










DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bidang Perumahan Rakyat
Seksi Penyediaan Perumahan

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS  IR. CHANDRA MUSTIKA NIP. 19590815 198703 1 007
Nama SOP	:	Updating Data Perumahan dan Permukiman

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/Pr/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Data Dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Pr/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/Pr/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/Pr/M/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Pr/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahterabagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan Minimal S1 2. Mengerti dengan tata cara Prosedur dan kelengkapan Usulan Penyediaan Perumahan 3. Memahami peraturan penilaian dan persetujuan Usulan Penyediaan Perumahan 4. Menguasai dan dapat mengoperasikan Komputer
Keterkaitan 1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar	Peralatan/perlengkapan 1. Alat tulis kantor, komputer, printer 2. Peraturan tentang penilaian Kelengkapan Usul 3. 4.
Peringatan 1. Keterlambatan waktu pelaksanaan tugas 2. Kurangnya peralatan dan tenaga teknis yang dibutuhkan	Pencatatan dan pendataan Manual dan elektronik

PROSEDUR


No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Staf	Kasie PP	Kabid Perumahan	Kepala Dinas	Instansi lain	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun Rekap data perumahan dan Permukiman kabupaten kota						Hasil Survey dan koordinasi	3 Jam	draft rekap data perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	
2	Memeriksa Hasil Rekap data Perumahan dan Permukiman						Draft Rekap dan tabulasi data	15 menit	Draft Rekap dan tabulasi data yang telah diperiksa dan diparaf	
3	Rapat ekspose updating data dan klarifikasi data						Draft Rekap dan tabulasi data yang telah diperiksa dan diparaf	30 Menit	Draft Rekap dan tabulasi data yang telah diperiksa dan diparaf	
4	Hasil Rekap Data yang sudah ditandatangani oleh Kabid						Draft Rekap dan tabulasi data yang telah diperiksa dan diparaf	10 Menit	Draft Rekap dan tabulasi data yang telah diperiksa dan ditandatangani	
5	Rekap data yang telah di tandatangani oleh Kadis dan dapat diekspose						Rekap dan tabulasi data yang telah ditandatangani	5 Menit	Rekap dan tabulasi data yang telah ditandatangani dan dapat diekspos	
6	Ekspose hasil rekap data						laporan pelaksanaan	10 Menit	Laporan Perjalanan Dinas	
								4 Jam 10 Menit		



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

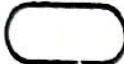
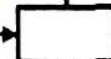





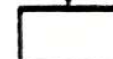

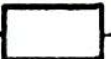

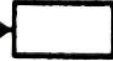
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Perumahan

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS  K. CHANDRA MUSTIKA NIP. 19590815 198703 1 007
Nama SOP	:	Usulan Pembiayaan Perumahan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah3 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/Prt/M/2014 Tentang Penyelenggaraan4 Data Dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2016 Tentang Peningkatan5 Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/Prt/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/Prt/M/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Prt/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahterabagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal S12. Bisa mengoperasikan komputer dan peta3. Memahami peraturan penilaian dan persetujuan Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 Surat Masuk2.	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Manual dan elektronik

PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Staf	Kasie PP	Kabid Perumahan	Bidang Lain	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima disposisi dari Kadis PKPP dan meneruskan surat usulan perumahan rakyat dari Kabupaten Kota ke Kabid Perumahan						Surat permohonan dan Kelengkapan persyaratannya	5 Menit	Surat permohonan dan Kelengkapan persyaratannya	SOP usulan pembiayaan
2	Menerima disposisi dari Kadis PKPP dan meneruskan surat ke Kasi Penyediaan Perumahan.						- Surat Usulan yang dilengkapi dengan lembar disposisi Kadis, Kabid dan Kasi. - Peraturan terkait	5 Menit	Surat permohonan dan Kelengkapan persyaratannya dan Notulen Rapat, Nota Dinas	
3	Menindaklanjuti Hasil Koordinasi dan Penelaahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku						Surat permohonan dan Kelengkapan persyaratannya dan Notulen Rapat, Nota Dinas	5 Menit	Surat arahan perbaikan/penolakan (apabila kurang). Dan Notulen Rapat, Nota Dinas	
4	Penilaian kelengkapan dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan)						Surat arahan perbaikan/penolakan (apabila kurang).	2 Jam	Konsep Telaahan Staff	
5	Meneruskan menjadi usulan program Dinas PKPP						Konsep Telaahan Staff	15 Menit	Surat Keluar	
6	Rekapitulasi Usulan Program Dinas PKPP						Laporan	30 Menit		
								3 Jam		



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bidang Perumahan Rakyat
Penyediaan Perumahan

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

KEPALA DINAS

Ir. CHANDRA MUSTIKA
NIP. 19590815 198703 1 007

Nama SOP

Pembinaan dan Peningkatan kapasitas Pokja Perumahan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/Pr/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Data Dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Pr/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/Pr/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/Pr/M/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Pr/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahterabagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan minimal S1
2. Bisa mengoperasikan komputer dan peta
3. Memahami peraturan penilaian dan persetujuan Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Keterkaitan

1. Surat Keluar
- 2.












Peralatan/perlengkapan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Manual dan elektronik

PROSEDUR


No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Staf	Kasie PP	Kabid Perumahan	Kepala Dinas	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat Draft SK, Usulan Nama Pokja dan Konsep nota dinas						contoh draft SK tahun Sebelumnya dan daftar Nama Usulan	20 Menit	draft SK dan Nota Dinas	POKJA PERUMAHAN
2	Memeriksa dan memaraf Draft SK, Usulan Nama Pokja dan Nota Dinas						Draft SK dan Nota Dinas	5 Menit	Draft SK dan Nota Dinas yang telah di Paraf	
3	Mengoreksi dan memaraf Draft SK Usulan Nama Pokja dan nota Dinas						Draft SK dan Nota Dinas yang telah di Paraf	5 Menit	Draft SK dan Nota Dinas yang telah di Paraf	
4	Menyetujui dan memaraf Draft SK dan Usulan Nama Pokja dan menandatangani Nota Dinas						Draft SK dan Nota Dinas yang telah di Paraf	5 Menit	Draft SK dan Nota Dinas yang telah di tandatangani	
	Menandatangani SK Pokja Perumahan						Draft SK dan Nota Dinas yang telah di tandatangani	5 Menit	SK Pokja Perumahan yang telah di tandatangani	
	Menerima dan menyerahkan SK untuk dilaksanakan						SK Pokja Perumahan yang telah di tandatangani	5 Menit	SK Pokja Perumahan yang telah di tandatangani	
5	Menerima dan menyerahkan SK untuk dilaksanakan						SK Pokja Perumahan yang telah di tandatangani	5 Menit	SK Pokja Perumahan yang telah di tandatangani	
6	Membuat Laporan Perjalanan Sesuai tugas dan tanggung jawab pada SK						laporan	10 Menit	laporan	
							1 Jam			



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bidang Perumahan Rakyat
Rehabilitasi Perumahan

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	<div>KEPALA DINAS</div> <div></div> <div>Ir. CHANDRA MUSTIKA</div> <div>NIP. 19590815 198703 1 007</div>
Nama SOP	:	Perencanaan Program Usulan Kegiatan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/Prt/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Data Dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman KumuhPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/Prt/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan SwadayaPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/Prt/M/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Prt/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahterabagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	<ol style="list-style-type: none">Minimal SLTA atau sederajat, S1Mengerti tata cara intelijenMengerti tata persuratan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">Surat Masuk dan Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none">
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Manual dan elektronik

PROSEDUR


No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Staf	Kasubag	Sekretaris	Kepala Dinas	Bidang/ UPTD	Pihak Lain	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima Surat Masuk terkait Rencana Usulan Kegiatan Tahun N+1										
2	Menerima Surat Usulan Tahun N+1 dan mendistribusikan kepada Kepala Bidang masing Masing								5 Menit		
4	Menyusun usulan anggaran untuk program dan kegiatan dalam tahun anggaran yang direncanakan beserta prakiraan maju berupa implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaannya berdasarkan pagu indikatif yang telah diterima							Usulan anggaran berdasarkan hasil analisa sesuai Renja	5 Menit		
5	Mengajukan usulan anggaran beserta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif yang telah diterima kepada Bappeda							Usulan anggaran dan prakiraan maju	1 hari	Tersajinya data program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan pertanahan Prov. Sumbar	
6	Menyusun anggaran berdasarkan usulan program dan kegiatan disesuaikan dengan pagu indikatif yang telah disetujui Bappeda untuk menghasilkan RKA pagu indikatif							Usulan anggaran yang telah diverifikasi Bappeda	1 hari	Usulan anggaran yang telah diverifikasi Bappeda	
7	Mengkoreksi RKA pagu indikatif yang telah disusun harus berdasarkan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan							Draft RKA	1 hari	Draft RKA	
8	Menyampaikan RKA kepada PPKD untuk dibahas TAPD/Bappeda							Draft RKA yang telah dikoreksi	3 Jam	Draft RKA yang telah dikoreksi	
9	Melakukan Pembahasan Draft RKA							Draft RKA yang telah dikoreksi	3 Jam	Tanda terima	
10	Penyempurnaan RKA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan pertanahan Prov. Sumbar tahun n+1							Draft RKA yang telah diperiksa dan di verifikasi Bappeda	1 Hari	Draft RKA yang telah diperiksa dan di verifikasi Bappeda	
11	Penyampaian RKA yang telah disempurnakan kepada bappeda untuk diverifikasi							Draft RKA yang telah disempurnakan	1 hari	Draft RKA yang telah diverifikasi Bappeda	
12	Melakukan penyusunan DPA Dishut Prov Sumbar							Draft RKA yang telah diverifikasi Bappeda	1 hari	Draft DPA	
13	Rapat pembahasan DPA bersama seksi dan bidang/UPTD lingkup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan pertanahan Prov. Sumbar							Draft DPA	1 hari	Hasil rapat	
14	Penyampaian DPA kepada Bappeda untuk diperiksa dan diverifikasi kembali							Draft DPA	1 hari	Draft DPA yang telah diverifikasi	
15	Melakukan rapat pembahasan dan penyempurnaan DPA hasil verifikasi Bappeda							Draft DPA yang telah diverifikasi	1 hari	DPA yang telah disempurnakan	
16	Menetapkan DPA Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan pertanahan Prov. Sumbar tahun n+1							DPA yang telah disempurnakan	1 hari	DPA ditetapkan	
									11 hari 6 jam 10 menit		



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bidang Perumahan Rakyat
Rehabilitasi Perumahan

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS  Ir. CHANDRA MUSTIKA NIP. 19590815 198703 1 007
Nama SOP	:	Pelaksanaan Bimtek, Workshop










Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/Pr/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Data Dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Pr/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/Pr/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/Pr/M/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Pr/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahterabagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1. Minimal SLTA atau sederajat, S1 2. Mengerti tata cara intelijen 3. Mengerti tata persuratan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Surat Keluar 2.	1. 2. 3. 4. 5.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Manual dan elektronik

PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Staf	Kasi	Kabid Perumahan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat Surat Undangan, Nota Dinas, SK Tim Pelaksana dan seluruh administrasi pelaksanaan Bimtek	<pre> graph TD S([Staf]) --> K1{ } K1 --> S K1 --> K2{ } K2 --> K3{ } K3 --> K4{ } K4 --> S5([Staf]) </pre>				Draft Surat Undangan, Nota Dinas, Telaahan Staff	60 Menit	Draft Surat Undangan, Nota Dinas, Telaahan Staff	
2	Memeriksa dan Mengajukan Surat Undangan, Nota Dinas, SK Tim Pelaksana dan Seluruh administrasi pelaksanaan Bimtek					Draft Surat Undangan, Nota Dinas, Telaahan Staff	15 menit	Draft Surat Undangan, Nota Dinas, Telaahan Staff	
3	Memeriksa, Mengajukan, dan Paraf Surat Undangan, Nota Dinas SK Tim Pelaksana dan Seluruh administrasi pelaksanaan Bimtek					Draft Surat Undangan, Nota Dinas, Telaahan Staff	15 menit	Draft Surat Undangan, Nota Dinas, Telaahan Staff yang telah di paraf Kasi	
4	Memeriksa, Menyetujui dan Menandatangani Surat Undangan, Nota Dinas SK Tim Pelaksana dan Seluruh administrasi pelaksanaan Bimtek					Draft Surat Undangan, Nota Dinas, Telaahan Staff yang telah di paraf Kabid	15 menit	Surat Undangan	
5	Mengirim Undangan					Surat Undangan	30 Menit	Tanda Terima Surat Undangan	
6	Pelaksanaan Bimtek, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan					Laporan Pelaksanaan		Laporan Pelaksanaan	
							2 Jam 15 Menit'		

NO.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Staf	Kasi pembiayaan	Kabid	Kadis	Tim	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Surat Undangan dan Telaahan pelaksanaan sertifikasi, registrasi, klasifikasi, Kualifikasi perumahan						Surat dan dokumen administrasi	15 menit	Surat Telaahan Staff, draft SPK	
2	Melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan pelaksanaan sertifikasi, registrasi, klasifikasi, Kualifikasi perumahan						Surat Telaahan Staff, draft SPK	2 Jam	Surat Telaahan Staff, draft SPK yg telah di paraf	
3	Melakukan penyiapan dan pembentukan Tim (Telaah dan SPT)						Surat Telaahan Staff, draft SPK yg telah di paraf	2 jam	SK Tim Pelaksana dan SPK	
4	Memeriksa Telaah Staf dan Konsep Surat Perintah Kerja						SK Tim Pelaksana dan SPK	1 jam	SK Tim Pelaksana dan SPK yang telah ditandatangani	
5	Menandatangani Surat Perintah Kerja Tim						SK Tim Pelaksana dan SPK yang telah ditandatangani	1 jam	Surat Perintah Tugas	
6	Penyelenggaraan , Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Perumahan;						Surat Perintah Tugas, laptop, infocus, Kamera	5 Hari	Surat Perintah Tugas, laptop, infocus, Kamera	
7	Membuat Laporan Penyelenggaraan Pembiayaan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Perumahan;						Pelaksanaan Lapangan	30 Menit	Pelaksanaan Lapangan	
8	Laporan penyelenggaraan Pembiayaan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Perumahan;						Laporan dan Benta Acara pelaksanaan	30 Menit		
9	Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Perumahan;						laporan pelaksanaan yang akan di evaluasi berikut rapat bersama tim pelaksana	30 Menit	Hasil evaluasi pelaksanaan beserta laporan	
								6 Hari		

ROSEDDU


NO.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Staf	Kasi pembiayaan	Kabid	Kadis	Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Surat Undangan dan Telaahan pelaksanaan sertifikasi, registrasi, klasifikasi, Kualifikasi perumahan						Surat dan dokumen administrasi	15 menit	Surat Telaahan Staff, draft SPK	
2	Melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan pelaksanaan sertifikasi, registrasi, klasifikasi, Kualifikasi perumahan						Surat Telaahan Staff, draft SPK	2 Jam	Surat Telaahan Staff, draft SPK yg telah di paraf	
3	Melakukan penyiapan dan pembentukan Tim (Telaah dan SPT)						Surat Telaahan Staff, draft SPK yg telah di paraf	2 jam	SK Tim Pelaksana dan SPK	
4	Memeriksa Telaah Staf dan Konsep Surat Perintah Kerja						SK Tim Pelaksana dan SPK	1 jam	SK Tim Pelaksana dan SPK yang telah ditandatangani	
5	Menandatangani Surat Perintah Kerja Tim						SK Tim Pelaksana dan SPK yang telah di tandatangi	1 jam	Surat Perintah Tugas	
6	Penyelenggaraan , Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Perumahan;						Surat Perintah Tugas, laptop, infocus, Kamera	5 Hari	Surat Perintah Tugas, laptop, infocus, Kamera	
7	Membuat Laporan Penyelenggaraan Pembiayaan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Perumahan;						Pelaksanaan Lapangan	30 Menit	Pelaksanaan Lapangan	
8	Laporan penyelenggaraan Pembiayaan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Perumahan;						Laporan dan Benta Acara pelaksanaan	30 Menit		
9	Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Perumahan;						laporan pelaksanaan yang akan di evaluasi berikut rapat bersama tim pelaksana	30 Menit	Hasil evaluasi pelaksanaan beserta laporan	
								6 Hari		



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Perumahan

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	<p>KEPALA DINAS</p>  <p>I. CHANDRA MUSTIKA NIP. 19590815 198703 1 007</p>
Nama SOP	:	Kerjasama FLPP

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/Pr/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Data Dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Pr/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/Pr/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/Pr/M/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Pr/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahterabagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kualifikasi pelaksana

1. Minimal SLTA atau sederajat, S1
2. Mengerti tata cara intelijen
3. Mengerti tata persuratan

Keterkaitan

1. Surat Masuk dan Surat Keluar
- 2.

Peralatan/perlengkapan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Manual dan elektronik

PERJANJIAN KINERJA ESSELON



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
perkimptanahan.sumbar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. CHANDRA MUSTIKA**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

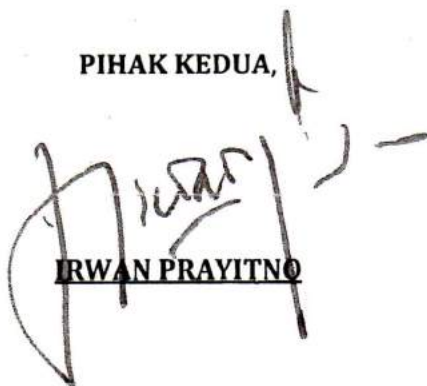
Nama : **IRWAN PRAYITNO**
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


IRWAN PRAYITNO

Padang, November 2018

PIHAK PERTAMA,



Ir. CHANDRA MUSTIKA
NIP. 19590815 198703 1 007

PERJANJIAN KINERJA

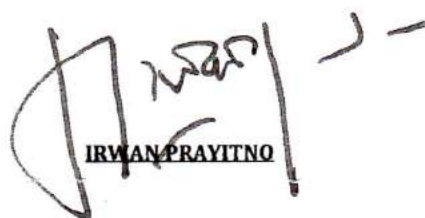
OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		- Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program /Kegiatan	Fisik 100% Keuangan 92 %
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	- Berkurangnya Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh Secara Konsisten dan Berkelanjutan	2 lokasi
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan	- Mengurangi Backlog Rumah	3%
4	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	- Persentase Fasilitas Pengadaan dan Masalah Pertanahan	85%

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 976.264.785	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.541.484.078	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 79.315.200	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp 144.960.000	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 455.723.300	
6	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 1.254.423.000	
7	Program Pengembangan Perumahan	Rp 1.623.188.392	
8	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp 4.556.321.659	
9	Program Pengelolaan Pertanahan	Rp 983.000.000	
	JUMLAH	Rp 11.614.680.414	

Padang, November 2018

Gubernur Sumatera Barat


IRWAN PRAYITNO

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat



Ir. CHANDRA MUSTIKA
NIP. 19590815 198703 1 007

PERJANJIAN KINERJA ESSELON III

BIDANG : PERTANAHAN
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	- Tersedianya Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	1 dokumen
2	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum	- Persentase Fasilitas Pengadaan Tanah	85%
3	Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Masalah Pertanahan	- Persentase Fasilitas Masalah Pertanahan	85%


No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Pertanahan	Rp 983.000.000	
1	Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	Rp 83.000.000	
2	Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp 79.000.000	
3	Bimtek Pengelolaan Pertanahan	Rp 103.000.000	
4	Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan	Rp 235.000.000	
5	Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Rp 269.000.000	
6	Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat	Rp 141.000.000	
7	Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	Rp 73.000.000	
	JUMLAH	Rp 983.000.000	

Padang, November 2018

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat

Kepala Bidang
Pertanahan

Ir. CHANDRA MUSTIKA
NIP. 19590815 198703 1 007


DARMANSYAH, SE, MM
NIP. 19641223 199303 1 003

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV

BIDANG : PERTANAHAN
SEKSI : PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENATAGUNAAN TANAH
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pembinaan Penetapan Subjek Objek Retribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	- Jumlah Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Retribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%
2	Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	- Jumlah Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	100%

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Pertanahan	Rp 162.000.000	
1	Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	Rp 83.000.000	
2	Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp 79.000.000	
	JUMLAH	Rp 162.000.000	

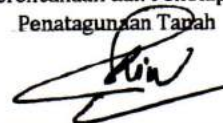
Padang, November 2018

Kepala Bidang
Pertanahan



DARMANSYAH, SE, MM
NIP. 19641223 199303 1 003

Kepala Seksi
Perencanaan dan Penetapan
Penatagunaan Tanah



EFRIZAL THAMRIN, S. Sos, MM
NIP. 19710331 200701 1 004

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV

BIDANG : PERTANAHAN
SEKSI : PENYELESAIAN MASALAH TANAH DAN IZIN LOKASI LINTAS DAERAH
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan Pembinaan dan Menetapkan Izin Lokasi	- Jumlah Izin Lokasi yang di Tangani	100%
2	Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan	- Jumlah Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan yang ditangani	100%

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Program Pengelolaan Pertanahan	Rp 214.000.000	
1	Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat	Rp 141.000.000	
2	Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	Rp 73.000.000	
	JUMLAH	Rp 214.000.000	

Padang, November 2018

Kepala Bidang
Pertanahan



DARMANSYAH, SE. MM
NIP. 19641223 199303 1 003

Kepala Seksi
Penyelesaian Masalah Tanah dan
Izin Lokasi Lintas Daerah



NOVION NURDIN
NIP. 19601214 198503 1 004

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV

BIDANG : PERTANAHAN
SEKSI : PENGADAAN TANAH
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Tanah	- jumlah Fasilitas Pelaksanaan Pengadaan Tanah	100%

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Program Pengelolaan Pertanahan	Rp 607.000.000	
1	Bimtek Pengelolaan Pertanahan	Rp 103.000.000	
2	Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan	Rp 235.000.000	
3	Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Rp 269.000.000	
	JUMLAH	Rp 607.000.000	

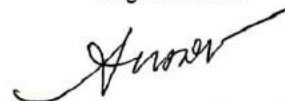
Padang, November 2018

Kepala Bidang
Pertanahan



DARMANSYAH, SE. MM
NIP. 19641223 199303 1 003

Kepala Seksi
Pengadaan Tanah



ANTOS LUKMAN, SSTP.MPA
NIP. 19810530 199112 1 003

PERJANJIAN KINERJA ESSELON III

UNIT KERJA : SEKRETARIAT
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Organisasi	- 1. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan Penganggaran	100%
		- 2. Waktu Penyampaian Laporan	Tepat Waktu
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Internal organisasi	- Tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan organisasi	Baik
3	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan	- Berkurangnya kesalahan hasil verifikasi keuangan	20%
4	Meningkatnya kualitas pengawasan internal organisasi	- Berkurangnya Temuan Pemeriksaan terhadap organisasi	20%

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 976.264.785	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 3.000.000	
2	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	Rp 183.630.846	
3	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 66.233.450	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 28.999.850	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 9.000.000	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 9.291.000	
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Rp 638.109.639	
8	Penyediaan jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Rp 38.000.000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.541.484.078	
9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 156.300.000	
10	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Rp 6.800.000	
11	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	Rp 83.640.202	
12	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 647.160.000	
13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 647.583.876	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 79.315.200	
14	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 79.315.200	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp 144.960.000	
15	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 144.960.000	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 455.723.300	
16	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Rp 94.179.950	
17	Penatausahaan Keuangan SKPD	Rp 218.274.550	
18	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 50.000.000	
19	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	Rp 93.268.800	
	JUMLAH	Rp 3.197.747.363	

Padang, November 2018

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat

Sekretaris

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV

SUB BAGIAN : UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Ketersediaan data Kepegawaian yang akurat	- Persentase ketersediaan data kepegawaian	100%
2	Meningkatnya pelayanan Administrasi kepegawaian	- Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan KGB yang diproses tepat waktu	100%
3	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Sarpras	- 1. Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%
		- 2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Pendukung Kinerja	100%
4	Meningkatnya tindaklanjut temuan pemeriksaan	- Persentase temuan yang didapat di tindaklanjuti	100%
5	Meningkatnya pejabat ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN	- Persentase pejabat di organisasi yang mengisi LHKPN/LHKASN	100%

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 976.264.785	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 3.000.000	
2	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	Rp 183.630.846	
3	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 66.233.450	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 28.999.850	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 9.000.000	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 9.291.000	
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Rp 638.109.639	
8	Penyediaan jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Rp 38.000.000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.541.484.078	
9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 156.300.000	
10	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Rp 6.800.000	
11	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 83.640.202	
12	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	Rp 647.160.000	
13	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 647.583.876	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 79.315.200	
14	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 79.315.200	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp 144.960.000	
15	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 66.088.000	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 455.723.300	
16	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Rp 94.179.950	
17	Penatausahaan Keuangan SKPD	Rp 218.274.550	
18	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 50.000.000	
19	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	Rp 93.268.800	
	JUMLAH	Rp 3.197.747.363	

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV

SUB BAGIAN : KEUANGAN DAN PROGRAM
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja) dan Pelaporan Organisasi	- 1. Jumlah Dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	Tepat Waktu
		- 2. Jumlah dokumen pelaporan yang disampaikan tepat waktu	Tepat Waktu
2	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja organisasi	- Nilai Pelaporan kinerja yang dievaluasi oleh inspektorat	B
3	Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan	- Penyampaian SPJ Paling lama 5 hari setelah bulan berkenaan	Tepat Waktu
4	Meningkatnya kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan aturan	- 1. Persentase SPJ yang administrasinya lengkap	100%
		- 2. Persentase SPJ yang sesuai dengan aturan penatausahaan keuangan	100%

No.	TUGAS	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 455.723.300	
1	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Rp 94.179.950	
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	Rp 218.274.550	
3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 50.000.000	
4	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	Rp 93.268.800	
	JUMLAH	Rp 455.723.300	

Padang, November 2018

Sekretaris

Kasubag Keuangan dan Program

YOLLY DETRA ASRAR, ST, MT
NIP. 19721230 200612 2 001

ELFITRI OKTAVIA, ST
NIP. 19761002 201101 2 001

PERJANJIAN KINERJA ESSELON III

BIDANG : PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Ketersediaan Rumah Layak Huni	- Rumah Layak Huni	10,00%
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Provinsi dan Korban Bencana Provinsi	- Pembangunan Rumah Baru	1 Kegiatan

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pengembangan Perumahan	Rp 1.623.188.392	
1	Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Rp 343.588.000	
2	Sosialisasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan	Rp 60.293.700	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan	Rp 64.971.700	
4	Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam	Rp 165.497.992	
5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat	Rp 199.540.000	
6	Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	Rp 148.435.000	
7	Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat	Rp 640.862.000	
	JUMLAH	Rp 1.623.188.392	

Padang, November 2018

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat


Ir. CHANDRA MUSTIKA
NIP. 19590815 198703 1 007

Kepala Bidang
Perumahan Rakyat


USRA DENI ST
NIP. 19660925 199303 1 005

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV

BIDANG : PERUMAHAN RAKYAT
SEKSI : PENDATAAN DAN PERENCANAAN PERUMAHAN
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah	- Jumlah Perencana Rumah dan PSU yang bersertifikasi	1 Kegiatan
2	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh	- Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	1 Kegiatan
3	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian bagi MBR	- 1. Jumlah Fasilitas Pembangunan Rumah Baru - 2. Jumlah Fasilitas Rehabilitasi RTLH bagi MBR	1 Kegiatan 1 Kegiatan

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Program Pengembangan Perumahan	988.837.000	
1	Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat	640.862.000	
2	Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	148.435.000	
3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat	199.540.000	
	JUMLAH	Rp 988.837.000	

Padang, November 2018

Kepala Bidang
Perumahan Rakyat


USRA DENI ST
 NIP. 19660925 199303 1 005

Kepala Seksi
PENDATAAN DAN PERENCANAAN PERUMAHAN


VIKY RAHMAT TIANDRA ST
 NIP.19840907 201101 1 002

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV

BIDANG : PERUMAHAN RAKYAT
SEKSI : PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pembangunan Rumah Korban Relokasi Program Pemerintah Provinsi	- Jumlah Pembangunan Rumah Baru	1 Kegiatan
2	Pembangunan Rumah Korban Bencana Provinsi	- Jumlah Pembangunan Rumah Baru	1 Kegiatan

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pengembangan Perumahan	Rp 343.588.000	
1	Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Rp 343.588.000	
	JUMLAH	Rp 343.588.000	

Padang, November 2018

Kepala Bidang
Perumahan Rakyat



USRA DENI ST
NIP. 19660925 199303 1 005

Kepala Seksi
PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN



Ir. NOVIA
NIP. 19631105 199202 2 001

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV

BIDANG : PERUMAHAN RAKYAT
SEKSI : PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERUMAHAN
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Perencanaan Perumahan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan 	1 Dokumen 1 Dokumen

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pengembangan Perumahan	Rp 290.763.392	
1	Sosialisasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan	Rp 60.293.700	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan	Rp 64.971.700	
3	Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam	Rp 165.497.992	
	JUMLAH	Rp 290.763.392	

Padang, November 2018

Kepala Bidang
PERUMAHAN RAKYAT



USRA DENI ST
NIP. 19660925 199303 1 005

Kepala Seksi
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERUMAHAN



Ir. EMA YULIS
NIP. 19630827 199703 2 001

PERJANJIAN KINERJA ESSELON III


BIDANG : KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh	- Luas Kawasan Kumuh yang tertangani	1 lokasi
2	Meningkatnya Penanganan PSU	- Jumlah PSU Kawasan yang tertangani	1 Lokasi


No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp 4.556.321.659	
1	Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	Rp 568.462.030	
2	Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi	Rp 1.817.697.594	
3	Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)	Rp 1.457.015.505	
4	Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus	Rp 480.038.430	
5	Penyusunan Ranperda Persampahan Provinsi Sumatera Barat	Rp 131.063.000	
6	Sosialisasi persampahan terhadap Kab/Kota	Rp 102.045.100	
II	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 1.254.423.000	
7	Peningkatan pembangunan Infrastruktur TPA Regional	Rp 1.254.423.000	
	JUMLAH	Rp 5.810.744.659	

Padang, November 2018

Kepala Dinas
 Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 Provinsi Sumatera Barat


IR. CHANDRA MUSTIKA
 NIP. 19590815 198703 1 007

Kepala Bidang
 Kawasan Permukiman


SIRDANY ST. MM
 NIP. 19620212 199203 1 008

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV

BIDANG : KAWASAN PERMUKIMAN
SEKSI : PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan	Jumlah Penanganan Infrastruktur Pada Kawasan Kumuh	1 lokasi
2	Peningkatan Infrastruktur TPA Sampah Regional Prov. Sumbar	Jumlah Penanganan Infrastruktur TPA Sampah Regional	1 lokasi

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp 1.281.608.560	
1	Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	Rp 568.462.030	
2	Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus	Rp 480.038.430	
3	Penyusunan Ranperda Persampahan Provinsi Sumatera Barat	Rp 131.063.000	
4	Sosialisasi persampahan terhadap Kab/Kota	Rp 102.045.100	
II	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 1.254.423.000	
1	Peningkatan pembangunan Infrastruktur TPA Regional	Rp 1.254.423.000	
	JUMLAH	Rp 2.536.031.560	

Kepala Bidang
Kawasan Permukiman


SIRDANY ST MM
 NIP. 19620212 199203 1 008

Padang, November 2018

Kepala Seksi
Penataan Permukiman Kumuh


IOKO SISWOYO ST
 NIP. 19770920 200901 1 008

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV

BIDANG : KAWASAN PERMUKIMAN
SEKSI : PENATAAN PERMUKIMAN STRATEGIS DAN KHUSUS
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan PSU di Kawasan Perumahan Bagi MBR Lintas Kabupaten/ Kota	- Penanganan Infrastruktur di Kawasan Perumahan bagi MBR Lintas Kabupaten/Kota	1 lokasi

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp 1.457.015.505	
1	Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)	Rp 1.457.015.505	
	JUMLAH	Rp 1.457.015.505	

Padang, November 2018

Kepala Bidang
Kawasan Permukiman



SIRDANY. ST. MM
NIP. 19620212 199203 1 008

Kepala Seksi
Penataan Permukiman Strategis dan Khusus



Ir. ALEX RIZAL MM
NIP. 19620809 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV

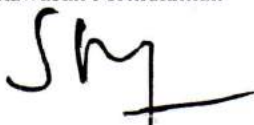
BIDANG : KAWASAN PERMUKIMAN
SEKSI : PRASARANA, SARANA UTILITAS UMUM KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan PSU di Kawasan Perumahan Bagi MBR Lintas Kabupaten/ Kota	- Tersedianya Perencanaan PSU di Kawasan Perumahan Bagi MBR Lintas Kabupaten/Kota	-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp 1.817.697.594	
1	Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi	Rp 1.817.697.594	
	JUMLAH	Rp 1.817.697.594	

Padang, November 2018

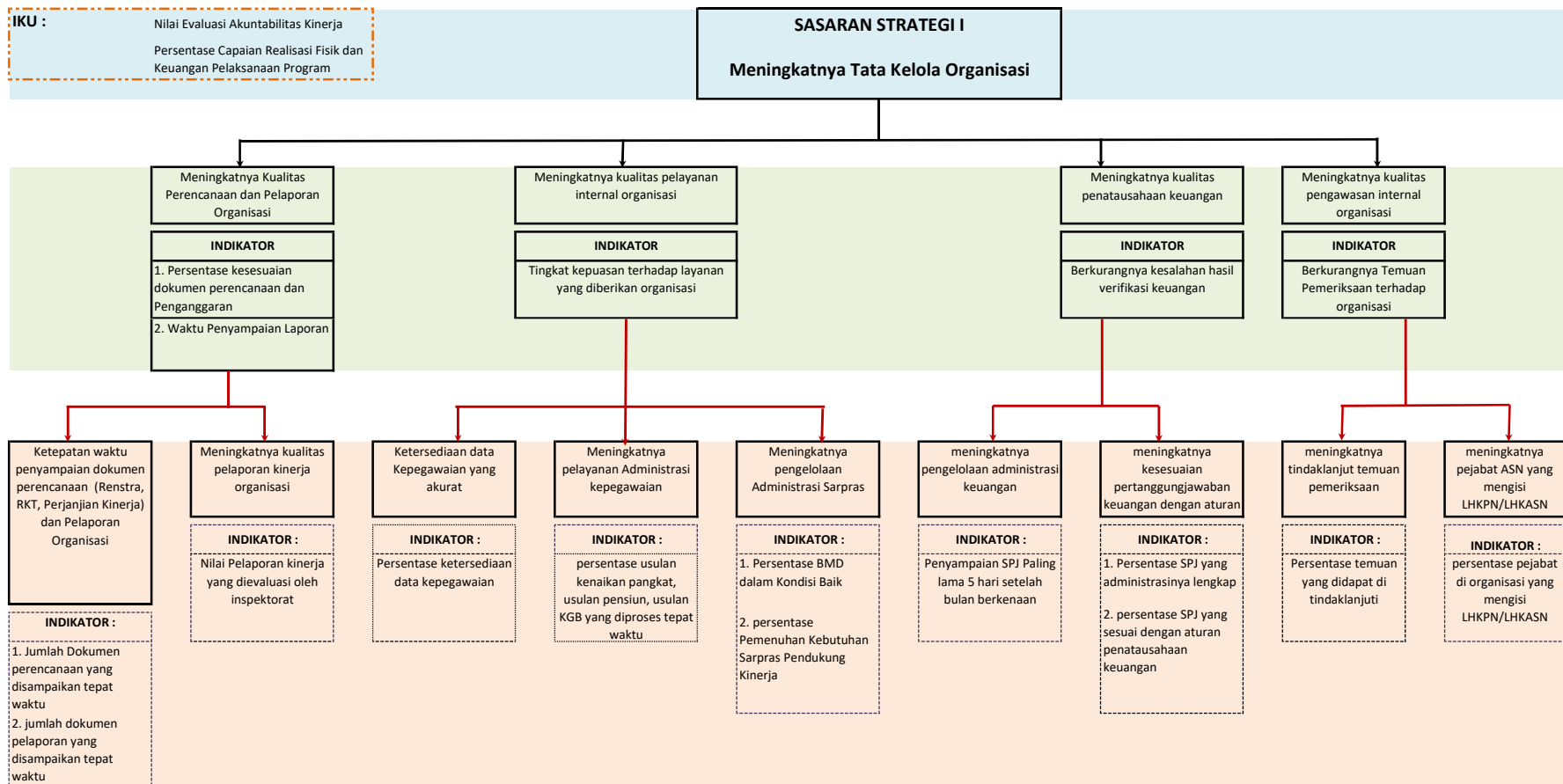
Kepala Bidang
Kawasan Permukiman


SIRDANY. S. M.
 NIP. 19620212 199203 1 008

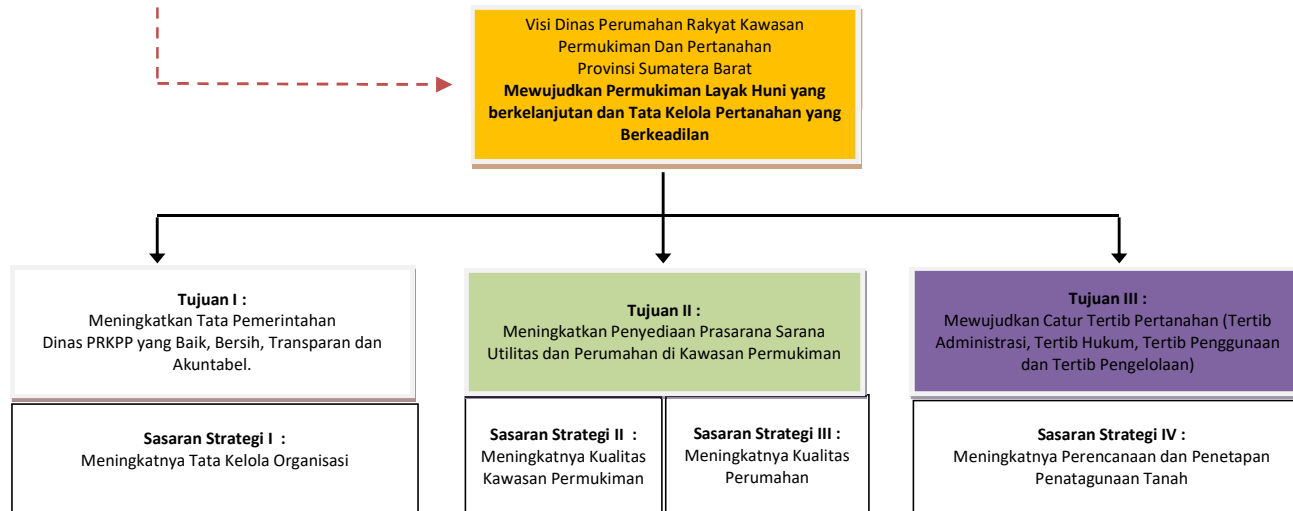
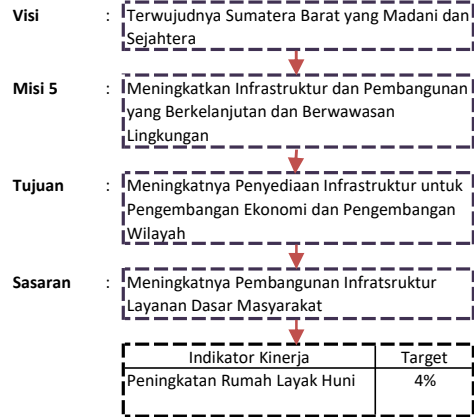
Kepala Seksi
Prasarana, Sarana Utilitas Umum
Kawasan Permukiman


Ir. SYAHRIZAL
 NIP. 19610821 199308 1 001

IKU, KRT, RENCANA AKSI



VISI MISI GUBERNUR SUMATERA BARAT



Padang,

2018

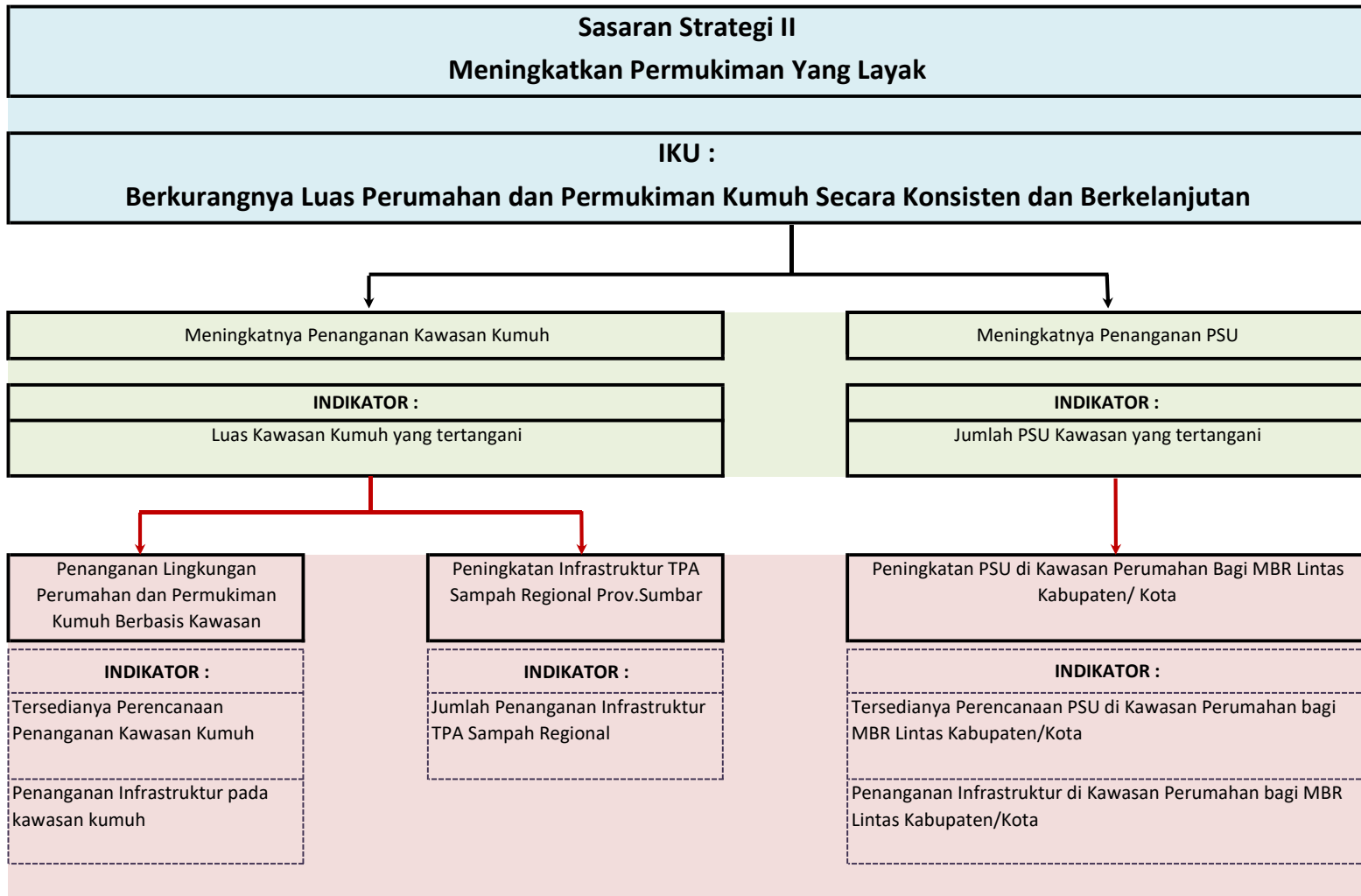
Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat



Ir. CHANDRA MUSTIKA
NIP. 19590815 198703 1 007

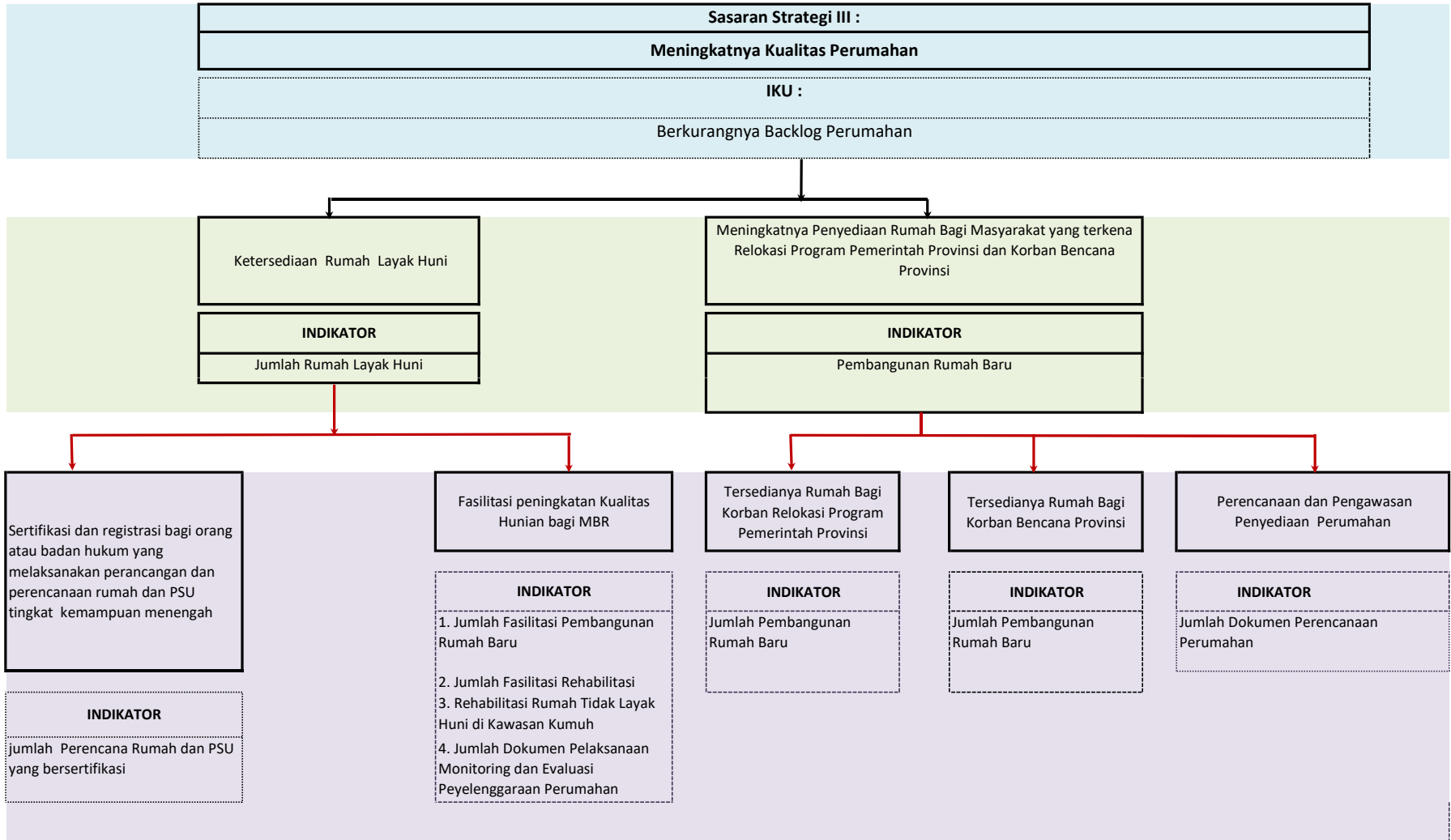
Cascading

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT



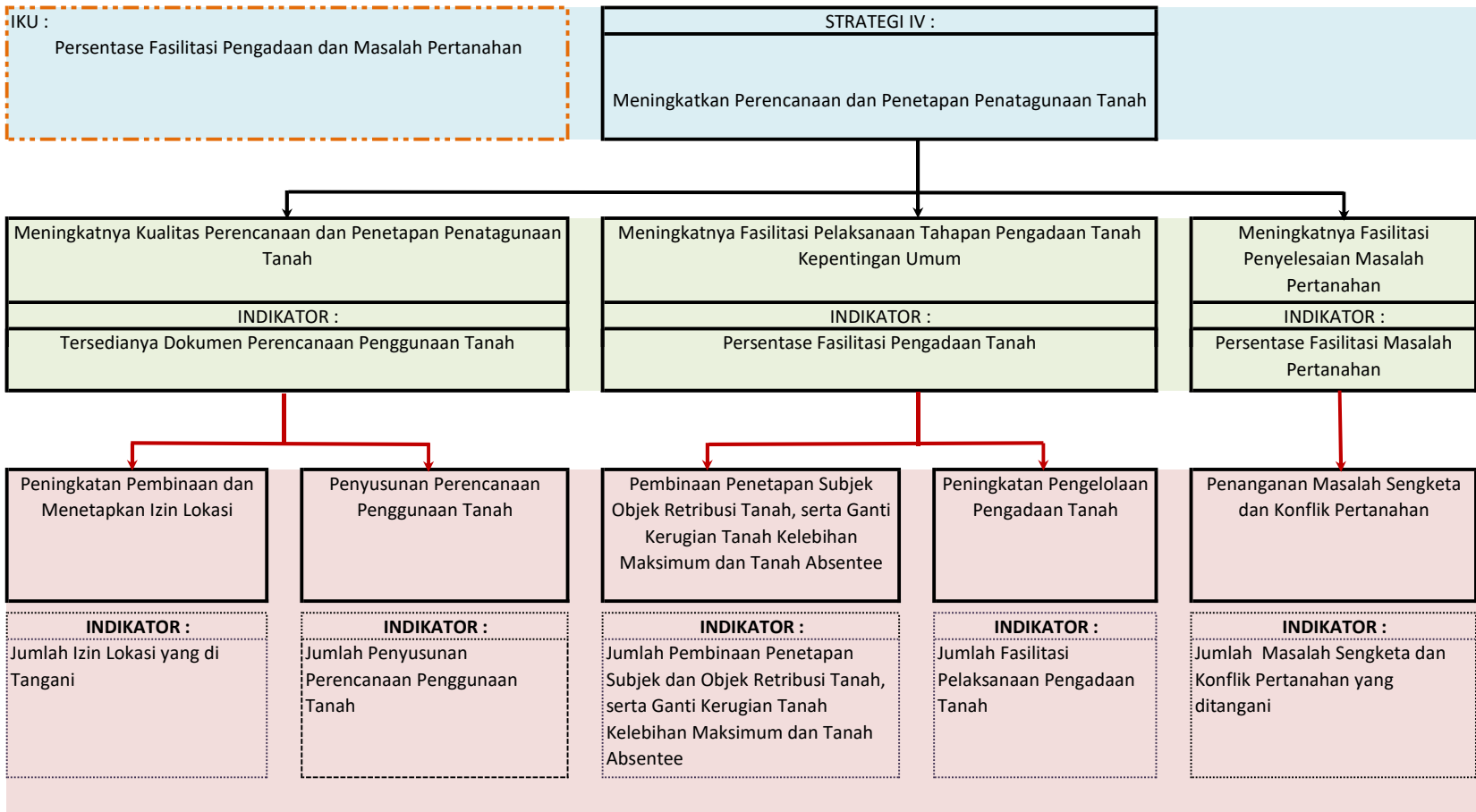
Cascading

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT



Cascading

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT



INDIKATOR KINERJA UTAMA

OPD/UNIT KERJA MANDIRI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2018

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Program
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		2	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2	Meningkatkannya Kualitas Kawasan Permukiman	1	Berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh secara konsisten dan berkelanjutan	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan	1	Berkurangnya Backlog Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
4	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	1	Persentase Fasilitas Pengadaan dan Masalah Pertanahan	Program Pengelolaan Pertanahan

KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT



Ir. CHANDRA MUSTIKA
NIP 19590815 198703 1 007

RENCANA KERJA TAHUNAN

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		- Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program	Fisik 100 % Keuangan 92%
2	Meningkatnya Kualitas Perumahan	- Mengurangi Backlog Rumah	3%
3	Meningkatkan Permukiman Yang Layak	- Berkurangnya Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh Secara Konsisten dan Berkelanjutan	2 lokasi
4	Meningkatkan Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	- Persentase Fasilitasi Pengadaan dan Masalah Pertanahan	85%
5	Meningkatnya Infrastruktur TPA Regional	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur TPA Sampah Regional	2 TPA Sampah Regional

Padang, November 2018

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat



Ir. CHANDRA MUSTIKA
NIP. 19590815 198703 1 007

RENCANA AKSI

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIFITAS	JADWAL PELAKSANAAN				KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	C	B	B	B	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	RKA dan DPA SKPD	3 Dokumen	Pengumpulan data					
								Penatausahaan Keuangan SKPD			Verifikasi Permasalahan					
								Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP, LKPJ dan LPPD	3 Laporan	Pengolahan Data					
								Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD			Melengkapi Dokumen Pendukung					
		Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program /Kegiatan					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pengumpulan data					
		Fisik :	5	20	60	100		Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor			Verifikasi Permasalahan					
		Keuangan :	10	30	50	92		Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pengolahan Data					
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Melengkapi Dokumen Pendukung					
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
								Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan								
								Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah								
								Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi								

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIFITAS	JADWAL PELAKSANAAN				KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV	
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi								
								Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD								
								Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya								
							Program Peningkatan Kapasitas Suimber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan								
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Berkurangnya Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh Secara Konsisten dan Berkelanjutan	-	-	-	2 Lokasi	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)			Menyusun Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri					
								Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi			Proses Pengadaan Barang dan Jasa					
								Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)			Pelaksanaan Pekerjaan					
								Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus			Serah Terima Hasil Pekerjaan					
								Penyusunan Ranperda Persampahan Provinsi Sumatera Barat			Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan					
								Sosialisasi Persampahan Terhadap Kab/Kota								

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIFITAS	JADWAL PELAKSANAAN				KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV	
							Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur TPA Regional								
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan	Mengurangi Backlog Rumah	-	-	-	3%	Program Pengembangan Perumahan	Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat			Menyusun Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri					
								Sosialisasi Percepatan Penyediaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan			Proses Pengadaan Barang dan Jasa					
								Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan			Pelaksanaan Pekerjaan					
								Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam			Serah Terima Hasil Pekerjaan					
								Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat			Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan					
								Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat								
								Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat								
4	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	Persentase Fasilitas Pengadaan dan Masalah Pertanahan	-	-	-	85%	Program Pengelolaan Pertanahan	Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah			Menyusun Kerangka Acuan Kerja					
								Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee			Menyiapkan bahan undangan dan permintaan narasumber					
								Bimtek Pengelolaan Pertanahan			Pelaksanaan Kegiatan					
								Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan			Melengkapi Dokumen Pendukung					

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN AKTIFITAS	JADWAL PELAKSANAAN				KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV	
								Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum			Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan					
								Penanganan Masalah Sangketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat								
								Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi								

Padang, 2018

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat



Ir. CHANDRA MUSTIKA
NIP. 19590815 198703 1 007